



**PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
(PPAS)
KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN
2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS	I-1
	1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS	I-2
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS	I-3
BAB II	RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	II-1
	2.1. Perubahan Pendapatan Daerah	II-2
	2.2. Perubahan Pembiayaan Daerah	II-4
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH	III-1
	3.1. Prioritas Pembangunan Tahun 2025	III-1
	3.2. Target Kinerja Pembangunan Tahun 2025	III-8
BAB IV	PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	IV-1
	4.1. Plafon Perubahan Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	IV-1
	4.2. Plafon Perubahan Anggaran Sementara Berdasarkan Perangkat Daerah	IV-10
	4.3. Plafon Perubahan Anggaran Sementara Berdasarkan Program Prioritas	IV-17
	4.4. Plafon Perubahan Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	IV-88
BAB V	RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	V-1
BAB VI	PENUTUP	VI-1
Lampiran	Matriks Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kabupaten Batang 2025	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Target Perubahan Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025	II-1
Tabel 3.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025	III-9
Tabel 3.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2025	III-10
Tabel 3.3.	Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2025	III-50
Tabel 3.4.	Penetapan Indikator Kinerja dan Program Prioritas Kabupaten Batang Tahun 2025	III-72
Tabel 4.1.	Plafon Perubahan Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025	IV-1
Tabel 4.2.	Perubahan Proporsi Anggaran Berdasarkan Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025	IV-10
Tabel 4.3.	Plafon Perubahan Anggaran Sementara untuk Belanja Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025	IV-88
Tabel 5.1.	Rincian Plafon Perubahan Anggaran Pembiayaan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025	V-1
Tabel 5.2.	Ringkasan APBD Perubahan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025	V-2
Tabel 5.3.	Struktur APBD Perubahan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025	V-4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN PPAS

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 merupakan tahap lanjutan dari Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 merupakan tahapan lanjutan dari Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, yang disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Perubahan ini disebabkan adanya perubahan sumber pendapatan, belanja maupun pembiayaan serta terbitnya beberapa pedoman/petunjuk teknis baru baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sehingga berakibat pada perubahan anggaran serta penyesuaian program maupun kegiatan di Perangkat Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 162 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ke dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Batang telah menyusun Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang menyusun Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025

Perubahan PPAS ini juga merupakan landasan kebijakan operasional bagi segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam penyusunan Rencana Anggaran Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) memuat substansi pokok sebagai berikut:

1. Prioritas program dan kegiatan yang mengalami perubahan baik karena penambahan, pergeseran, maupun pengurangan anggaran untuk masing-masing urusan.
2. Plafon anggaran yang masih bersifat sementara untuk masing-masing program dan kegiatan yang mengalami perubahan baik karena penambahan, pergeseran, maupun pengurangan anggaran.

Proses dan mekanisme penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Batang Tahun 2025 telah mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku serta disusun berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2025.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN PPAS

Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah:

1. Sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah daerah;
2. Menyinkronkan arah kebijakan umum anggaran pembangunan Kabupaten Batang tahun 2025 disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan.
3. Menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, serta pelayanan masyarakat yang telah tercantum dalam RKPD;

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. Sebagai dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyusun perubahan RKA-PD mengingat terdapat perubahan pada program, kegiatan, sub kegiatan maupun capaian kinerja.
6. Menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kemampuan dan daya dukung anggaran.
7. Menyesuaikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan perubahan-perubahan yang terjadi selama semester pertama tahun 2025.
8. Mengefektifkan pelaksanaan rencana pembangunan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN PPAS

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
14. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031;

29. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026;
30. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025.
31. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
32. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025;
33. Surat Edaran Bupati Batang Nomor P/0626/100.3.4.2/III/2025 tentang Efisiensi dan Relokasi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025.
34. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Kabupaten Batang Tahun 2025.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana perubahan pendapatan daerah berisikan tentang rencana pendapatan daerah sebelum perubahan dan rencana pendapatan daerah setelah perubahan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan KUA. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas kemandirian suatu daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari dua jenis Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah uraian tentang rincian perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun 2025:

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025

KODE AKUN	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.978.458.065.209,00	1.934.794.577.587,00	(43.663.487.622,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	411.689.806.831,00	408.008.196.787,00	(3.681.610.044,00)
4.1.01	Pajak Daerah	230.125.000.000,00	217.360.000.000,00	(12.765.000.000,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	157.757.588.738,00	170.109.274.970,00	12.351.686.232,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.774.761.093,00	17.024.865.330,00	(749.895.763,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.032.457.000,00	3.514.056.487,00	(2.518.400.513,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.566.288.258.378,00	1.526.786.380.800,00	(39.501.877.578,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.474.851.006.578,00	1.440.294.530.000,00	(34.556.476.578,00)

4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.437.251.800,00	86.491.850.800,00	(4.945.401.000,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	480.000.000,00	0,00	(480.000.000,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	480.000.000,00	0,00	(480.000.000,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.000.000.000,00	144.858.198.150,73	74.858.198.150,73
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.000.000,00	144.858.198.150,73	74.858.198.150,73
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	60.000.000.000,00	139.858.198.150,73	79.858.198.150,73

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang, 2025

2.1. PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Struktur Pendapatan Daerah pada APBD tahun 2025 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan daerah pada APBD tahun 2025 meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Kabupaten Batang pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 1.978.458.065.209,00 Sedangkan Pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 1.934.794.577.587,00 mengalami Penurunan sebesar Rp. 43.663.487.622,00 atau sebesar 2,21% dari proyeksi sebelumnya. Pendapatan Transfer dari Rp. 1.566.288.258.378,00 menjadi Rp. 1.526.786.380.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 39.501.877.578,00 dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dari Rp. 480.000.000,00 menjadi Rp.0,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 480.000.000,00. Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp. 3.681.610.044,00.

2.1.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (laba dari Badan Usaha Milik Daerah), dan Lain-lain PAD yang sah.

Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang Tahun 2025 mengalami penurunan dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 411.689.806.831,00 menjadi Rp. 408.008.196.787,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penurunan Pendapatan Pajak Daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 230.125.000.000,00 menjadi Rp. 217.360.000.000,00
2. Perubahan Hasil Retribusi Daerah tahun 2025 ditargetkan menjadi Rp. 170.109.274.970,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.351.686.232,00 atau sebesar 7,83% dari target sebelumnya.
3. Target PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 mengalami penurunan dari target sebelumnya, yaitu sebesar Rp 749.895.763,-
4. Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 3.514.056.487,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.518.400.513,00 atau sebesar 41,75% dari target sebelumnya.

2.1.2. Perubahan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 1.566.288.258.378,00 mengalami perubahan target menjadi Rp. 1.526.786.380.800,00 mengalami Penurunan sebesar Rp. 39.501.877.578,00 atau mengalami kenaikan sebesar 2,52% dari target sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025 semula ditargetkan Rp 1.474.851.006.578,00 menjadi Rp. 1.440.294.530.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 34.556.476.578,00 atau sebesar 2,34% dari target sebelumnya.

2. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2025 yang awalnya ditargetkan Rp. 91.437.251.800,00 menjadi Rp. 86.491.850.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 4.945.401.000,00 atau sebesar 5,41% dari sebelumnya.

2.1.3. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada aspek Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah untuk tahun 2025 mengalami perubahan sebesar Rp. 480.000.000,00 yang sebelumnya ditargetkan dari pendapatan hibah sebesar Rp. 480.000.000,00 menjadi Rp. 0.

2.2. PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri atas kebijakan penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dimana penerimaan pembiayaan tahun 2025 pada mulanya diproyeksikan sebesar Rp. 70.000.000.000,00 menjadi Rp. 144.858.198.150,73 mengalami kenaikan Rp. 74.858.198.150,73 atau sebesar 106,94%, penerimaan pembiayaan seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang selanjutnya digunakan sebagai Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 sehingga perubahan Pembiayaan Netto mengalami kenaikan sebesar Rp. 79.858.198.150,73 dari Rp. 60.000.000.000 menjadi Rp. 139.858.198.150,73.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Target dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 pada dasarnya merupakan rumusan prospektif dan direktif-indikatif bagi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan permasalahan-permasalahan prioritas dan isu strategis pada tahun bersangkutan. Konstruksi permasalahan dan isu strategis sendiri merupakan hasil dari kajian atau evaluasi kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, perkiraan kemampuan keuangan daerah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Batang pada tahun terencana dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah.

3.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Dengan menyongsong tema pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2025 diarahkan pada **“Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi sektor pariwisata”** dengan fokus sebagai berikut:

- a. Membangun kolaborasi multipihak dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, melalui:
 - a) Kolaborasi antara pihak pemerintah dan dunia usaha dalam pemenuhan pelayanan dasar;
 - b) Membangun kolaborasi dalam peningkatan budaya literasi di masyarakat;
 - c) Penguatan kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam gerakan kembali ke sekolah.
- b. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan:
 - a) Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar kesehatan, menurunkan kasus stunting serta penuntasan ODF;
 - b) Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik;

- c) Peningkatan upaya pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana.
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, kolaborasi dengan dunia usaha serta optimalisasi teknologi informasi untuk:
 - a) Pelatihan berkelanjutan untuk pekerja ber ketrampilan rendah;
 - b) Pemanfaatan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pokdarwis;
 - c) Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan;
 - d) Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam olahraga;
 - e) Pengembangan yang fokus pada sinergitas dan kolaborasi antar lembaga (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) dalam penanggulangan kemiskinan.
- d. Perwujudan Kabupaten yang ramah perempuan dan layak anak, melalui:
 - a) Meningkatkan pembangunan perempuan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
 - b) Penguatan peran serta lembaga dan masyarakat terkait upaya perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak korban Kekerasan Seksual, TPPO, dan Penelantaran Anak;
 - c) Perwujudan Kabupaten Layak Anak.
- e. Penguatan Sistem Kesehatan Integratif dan Holistik, melalui:
 - a) Deteksi dini melalui perluasan case detection, skrining awal, surveilans penyakit menular dan tidak menular, rapid test dan PCR;
 - b) Penanganan dan pengobatan penyakit melalui karantina kesehatan, pemenuhan farmasi dan alkes;
 - c) Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Promkes, germas dan PHBS.
- f. Menciptakan nilai tambah sektor unggulan serta diversifikasi ekonomi, melalui:
 - a) Mendorong iklim investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, promosi investasi, pengurangan / penundaan pembayaran pajak serta penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b) Meningkatkan pariwisata daerah melalui promosi wisata, fasilitasi pengembangan atraksi dan amenitas wisata;

- c) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian antara lain melalui bantuan alat, pemberian bantuan benih/bibit/ternak/pakan ternak, fasilitasi dan bantuan pemasaran produk, pemanfaatan pekarangan, serta intensifikasi pertanian;
 - d) Menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan masyarakat;
 - e) Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi & produktivitas pertanian, perkebunan, peningkatan produksi hasil peternakan & perikanan serta penyediaan cadangan pangan daerah;
 - f) Peningkatan dan pengembangan media promosi dan informasi pariwisata “on hand” dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
 - g) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - h) Pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan fasilitas pengolahan hasil perikanan; pengembangan kawasan minapolitan; dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.
- g. Akselerasi pemulihan dan penguatan UMKM, difokuskan melalui:
- a) Meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses permodalan bagi Wirausaha dan UMKM, fasilitasi bantuan pemasaran produk UKM, dukungan sarana & prasarana UMKM serta pendampingan dan pelatihan usaha/manajemen UKM;
 - b) Peningkatan penciptaan peluang usaha melalui fasilitasi wirausaha melalui pendampingan, penyiapan SDM, fasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk UMKM, kemudahan perijinan usaha serta peningkatan promosi dan pemasaran produk
- h. Mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi melalui:
- a) Pengembangan daya saing dan kemandirian desa, dan pemerataan pendapatan;
 - b) Penciptaan dan perluasan lapangan kerja dengan padat karya disektor infrastruktur, pelatihan kerja dan bantuan alat, job market serta fasilitasi penyelesaian kasus sengketa;

- c) Mengembangkan kesempatan kerja terkait dengan pembangunan Kawasan Industri Terpadu.
- i. Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin, melalui:
 - a) Peningkatan jangkauan pendidikan melalui beasiswa untuk siswa miskin dan optimalisasi pendidikan non formal;
 - b) Penyediaan Rumah Layak Huni pada masyarakat berpenghasilan rendah/miskin dan bagi korban bencana daerah;
 - c) Peningkatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti serta pemberian jaminan dan perlindungan social;
 - d) Penguatan dan peningkatan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat utamanya bagi masyarakat rentan;
 - e) Sinergitas dan kerjasama lintas sektor dan tingkat pemerintahan terkait dalam penanggulangan kemiskinan.
- j. Pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan strategis serta pro lingkungan berkelanjutan, melalui:
 - a) Pembangunan infrastruktur untuk mendukung wilayah strategis dan konektifitas antar wilayah;
 - b) Penataan sistem transportasi, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu;
 - c) Peningkatan ketersediaan dan cadangan sumber daya air;
 - d) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan akses aman air minum dan sanitasi;
 - e) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur air limbah;
 - f) Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan padat dan/atau permukiman kumuh serta menyediakan sarana dan prasarana permukiman.
- k. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, melalui:
 - a) Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan;
 - b) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta pengolahan limbah rumah tangga dan limbah industri.
- l. Reformasi Birokrasi di semua level pemerintahan:

- a) Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi;
 - b) Peningkatan peran penelitian dan pengembangan (Litbang) sebagai *Research Based Policy*;
 - c) Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen risiko.
- m. Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber pendanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
 - a) Peningkatan upaya dukungan pendanaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*), BUMN serta *Corporate Social Responsibility* (CSR);
 - b) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- n. Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif serta gesit, responsif, inovatif, melalui:
 - a) Pengembangan dan peningkatan budaya inovasi bagi perangkat daerah melalui Perangkat Daerah Inovatif maupun masyarakat melalui Krenova;
 - b) Peningkatan keterbukaan akses publik terhadap informasi;
 - c) Peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi yang valid dan up to date serta keterbukaan informasi dan satu data sebagai langkah berbenah dalam penyediaan data;
 - d) Meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi Teknologi Informasi;
 - e) Meningkatkan kualitas sumber daya ASN melalui peningkatan kapasitas dan peningkatan pengelolaan manajemen ASN;
 - f) Optimalisasi pelaksanaan SKM sebagai dasar perbaikan pelayanan, utamanya pada perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik.
- o. Penyiapan dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, fokus pada penyediaan informasi rawan bencana, Konservasi dan rehabilitasi lahan serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- p. Penguatan modal sosial untuk peningkatan kondusifitas wilayah, melalui:
 - a) Peningkatan pendidikan karakter dan budaya sejak dini serta Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya;
 - b) Penguatan kapasitas kelompok masyarakat, komunitas dan tokoh2 agama tentang wawasan kebangsaan serta parpol dalam pengembangan etika budaya politik;

- c) Peningkatan ketertiban dan keamanan kenyamanan lingkungan dengan fokus pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat/ lembaga kemasyarakatan mulai dari tingkat dukuh, desa, RT/RW hingga Kel/Kec.

Arah kebijakan dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Batang tahun 2025 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2025 yaitu:

1. PDRB Per Kapita (ADHK) sebesar 22,3
2. Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,51
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,98
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 63,96
6. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,1
7. Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan sebesar 9,803 ribu rupiah per tahun
8. Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia) sebesar 21,6
9. Persentase Penduduk Miskin sebesar 8,34
10. Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 5,6
11. Indeks Infrastruktur sebesar 197,04
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 65,04
13. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,66
14. Nilai SAKIP Skor 70,05
15. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) sebesar Level 3
16. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 79
17. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85,45
18. Indeks Risiko Bencana (IRBI) sebesar 155
19. Indeks Rasa Aman sebesar 4,2
20. Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,81
21. Indeks Demokrasi sebesar 72
22. Angka Kriminalitas sebesar 0,015 persen

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan maka ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Perwujudan kondusivitas wilayah

Kondusivitas wilayah menjadi salah satu prasyarat dalam perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Penguatan kondusivitas wilayah difokuskan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, sinergi antar organisasi dalam penguatan kerukunan antar umat beragama, serta pengamanan pada pelaksanaan pilkades

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pembangunan SDM saat ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing diarahkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Upaya ini diharapkan mampu mendongkrak nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Batang.

3. Pengembangan ekonomi lokal dan penguatan daya saing industri pariwisata

Pengembangan ekonomi lokal sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan perekonomian di daerah. Langkah ini tak lepas dari peran pemerintah daerah dan juga stakeholder yang terkait untuk merangsang aktivitas usaha dalam menciptakan lapangan kerja. Salah satu strategi dalam pengembangan ekonomi lokal yaitu melalui sektor pariwisata. Pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata ini dilakukan sebagai upaya yang komprehensif guna meningkatkan taraf hidup lebih baik bagi masyarakat dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam keberlangsungannya. Pengembangan ekonomi lokal melalui sektor industri pariwisata ini diharapkan mampu memantik sektor UMKM dan ekonomi kreatif untuk dapat tumbuh melihat adanya potensi alam, dan keunggulan daerah di setiap kawasan pariwisata. Sehingga dengan langkah ini diharapkan juga mampu meningkatkan perekonomian desa dan daerah melalui pengembangan pariwisata.

4. Pemantapan kualitas infrastruktur dasar

Pelayanan infrastruktur yang berkualitas akan memudahkan pergerakan roda ekonomi di suatu daerah. Infrastruktur dasar menjadi langkah utama mendukung pemerataan dan aksesibilitas wilayah. Dari tahun ke tahun, pembangunan infrastruktur dasar difokuskan pada pembangunan infrastruktur di wilayah strategis seperti jalan, jembatan, irigasi, dan bendungan; pengembangan aksesibilitas wilayah; Peningkatan Pengelolaan lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau; Pencegahan dan Peningkatan kualitas lingkungan kumuh; Peningkatan kualitas permukiman padat; serta Pengendalian pencemaran dan penanganan lahan kritis. Namun pada tahun 2025, dalam mendukung tema pembangunan pada sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur diprioritaskan mendukung kawasan pariwisata. Infrastruktur pada kawasan pariwisata harus diarahkan pada perbaikan jalan, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, dan sanitasinya.

5. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik akan berdampak positif bagi masyarakat dan pemerintah dan menjadi salah satu agenda utama dilaksanakannya reformasi birokrasi di Indonesia. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah yang lebih cepat, tanggap dan responsif dalam mendukung ketercapaian Agile Governance. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik ini diarahkan untuk optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, Pengelolaan manajemen risiko di lingkungan pemerintahan, pengembangan dan peningkatan budaya inovasi di pemerintahan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas sumber daya aparatur, dan peningkatan kualitas data informasi pembangunan.

3.2. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Koordinator
1	PDRB Per Kapita (ADHK)	juta rupiah	22,9	Sekretariat Daerah
2	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,5413	Sekretariat Daerah
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,75	Sekretariat Daerah
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,95	Sekretariat Daerah
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	63,96	Sekretariat Daerah
6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,50-6,10	Sekretariat Daerah
7	Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan	(Rp. 000/tahun)	9.896	Sekretariat Daerah
8	Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	Persen	21,7	Sekretariat Daerah
9	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,34-8,27	Sekretariat Daerah
10	Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	5,80-5,27	Sekretariat Daerah
11	Indeks Infrastruktur	Indeks	200	Sekretariat Daerah
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,14	Sekretariat Daerah
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,96	Sekretariat Daerah
14	Nilai SAKIP	Skor	71,25	Sekretariat Daerah
15	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Indeks	Level 3	Sekretariat Daerah
16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	80	Sekretariat Daerah
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,6	Sekretariat Daerah
18	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	150	Sekretariat Daerah
19	Indeks Rasa Aman	Indeks	4,4	Sekretariat Daerah
20	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,83	Sekretariat Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Koordinator
21	Indeks Demokrasi	Indeks	74	Sekretariat Daerah
22	Angka Kriminalitas	Persen	0,014	Sekretariat Daerah

Sumber : BPKPAD Kabupaten Batang, 2025

Selanjutnya, Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Batang tahun 2025, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran, IKU perangkat daerah, serta indikator program perangkat daerah. Indikator kinerja daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
 Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2025

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	{(PDRB th n – PDRB th (n-1)) : PDRB th (n-1)} x100	5,50-6,10	Sekretariat Daerah
2	Laju Inflasi (%)	%	Angka Inflasi	2,3-3,3	Sekretariat Daerah
3	PDRB Per Kapita(Rp.juta)	juta rupiah	PDRB th n : jumlahpenduduk th n	22,9	Sekretariat Daerah
4	Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	%	Persentase pendapatan penduduk 40 terendah terhadaptotal pendapatan	21,7	Sekretariat Daerah
5	Persentase Kemiskinan (%)	%	Jumlah pendudukmiskin di Kab. Batang: jumlahpenduduk Kab.Batang	8,34-8,27	Sekretariat Daerah
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	Rata-rata geometrikdari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran	70,75	Sekretariat Daerah
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	Rasio IPM Perempuan dibanding IPM Laki-Laki	92,25	Sekretariat Daerah
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	Peran serta wanita dalam kehidupan ekonomi dan politik	63,96	Sekretariat Daerah
9	Angka Harapan Hidup (tahun)	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata- rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurutumur	74,94	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
10	Harapan Lama Sekolah (th)	Tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	12,5	Sekretariat Daerah
11	Rata-Rata Lama Sekolah (th)	Tahun	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	7,2	Sekretariat Daerah
12	Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan (Rp.000/tahun)	juta rupiah	Rata-rata pengeluaran penduduk pertahun	9.896	Sekretariat Daerah
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	(Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja : Jumlah penduduk angkatan kerja) x100	5,80-5,27	Sekretariat Daerah
14	Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	%	Jumlah Desa Siaga Aktif strata mandiri : jumlah desa/kelurahan x100	14,11	Sekretariat Daerah
15	Tingkat Kesempatan kerja	%	Jumlah penduduk bekerja : jumlah angkatan kerja x 100	97	Sekretariat Daerah
16	Rasio penduduk yang bekerja	%	Jumlah Penduduk 15th ke atas : Angkatan Kerja x 100	74	Sekretariat Daerah
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil survei kepuasan masyarakat	85,6	Sekretariat Daerah
18	Persentase Peningkatan PAD	%	[(Realisasi PAD tahun n)-(Realisasi PAD Tahun n-1)] : (Realisasi PAD Tahun n-1)*100	1,36	Sekretariat Daerah
19	Opini BPK	Opini	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	Sekretariat Daerah
20	Persentase penguatan cadangan pangan daerah	%	jumlah cadangan pangan tahun n dikurangi tahun n-1 : tahun n-1 x 100	0,025	Sekretariat Daerah
21	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	Hasil kali konsumsi energi dengan bobot dibandingkan dengan Skor Maksimal Kelompok Pangan	89,7	Sekretariat Daerah
22	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan : Jumlah PDRB x100	24,77	Sekretariat Daerah
23	Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	(Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n dikurangi Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1 : Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1) x 100	19	Sekretariat Daerah
24	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB dari BPS	13,24	Sekretariat Daerah
25	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dari BPS	33,02	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
B	Aspek Daya Saing Daerah				
1	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	Nilai IDSD	3,5413	Sekretariat Daerah
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Capaian implementasi reformasi birokrasi yang meliputi 8 komponen	69,96	Sekretariat Daerah
3	Nilai SAKIP	Skor	(30 perencanaan kinerja + 25 pengukuran kinerja + 15 pelaporan kinerja + 10 evaluasi internal + 20 capaian kinerja)	71,25	Sekretariat Daerah
4	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Indeks	Penilaian secara kualitatif melalui reviu dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi terhadap 8 komponen, 28 aspek dan 69 kriteria yang telah ditetapkan	level 3	Sekretariat Daerah
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	IKLH Kabupaten = =(0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	65,14	Sekretariat Daerah
6	Indeks Infrastruktur	Indeks	Indeks Infrastruktur tingkat Kabupaten/Kota = 0,4122 *jalan + 0,4149*air + 0,4620*sanitasi + 0,4368 * pkpl + 0,5037*telp_int	200	Sekretariat Daerah
7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	Penilaian terhadap 6 dimensi yaitu: 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran; 2. Pengalokasian belanja APBD; 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah; 4. Penyerapan Anggaran; 5. Kondisi Keuangan Daerah; 6. Opini BPK atas LKPD	80	Sekretariat Daerah
8	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/ kota	150	Sekretariat Daerah
9	Indeks Rasa Aman	Indeks	survei / kuesioner kepada masyarakat	4,4	Sekretariat Daerah
10	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	Kuantitatif & Kualitatif, melalui kuesioner terhadap 7 Parameter Indeks Ketahanan Daerah	0,83	Sekretariat Daerah
11	Indeks Demokrasi	Indeks	Kualitatif, melalui kuesioner	74	Sekretariat Daerah
12	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	Total Pengeluaran RT Non Pangan : Total Pengeluaran x 100	47,56	Sekretariat Daerah
13	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB	Rasio	Jumlah ekspor dan impor barang dan jasa / PDB	0,09	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
14	Angka kriminalitas	Rasio	Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun : Jumlah penduduk	0,014	Sekretariat Daerah
15	Angka Beban ketergantungan	%	(Penduduk usia 64: Penduduk usia 15-64) x100	42,66	Sekretariat Daerah
C	Aspek Pelayanan Umum				
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1	Pendidikan				
	Angka Partisipasi Sekolah	%	Jumlah peserta didik usia 5-15 tahun : jumlah penduduk usia 5-15 tahun x 100	100	Disdikbud
	Angka pendidikan yang ditamatkan	%	Persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan	80,5	Disdikbud
	Persentase guru berkualifikasi S1/D4	%	Jumlah guru berkualifikasi S1/D4 : jumlah guru seluruhnya x100	100	Disdikbud
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	Disdikbud
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79	Disdikbud
	Persentase capaian SPM Pendidikan	%	Jumlah jenis layanan SPM Bidang Pendidikan yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Bidang Pendidikan x 100	100	Disdikbud
	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal : jumlah seluruh satuan pendidikan x 100	95	Disdikbud
2	Kesehatan				
	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	Jumlah kematian ibu maternal tetapi bukan disebabkan karena kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu / jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	112	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu / jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1.000	7,6	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Angka prevalensi balita stunting	%	Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan status pendek di suatu wilayah kerjapada kurun waktu tertentu/Jumlah Balita usia 0-59 bulan yang diukur panjang atau tinggi badan pada wilayah dan kurun waktu yang sama x 100	13,61	Dinas Kesehatan
	Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan (UU No. 40 Th 2004 dan UU No.36 Th2009)	%	Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan :jumlah penduduk x100	90	Dinas Kesehatan
	Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar (PMK 43. Th 2019)	%	Jumlah puskesmasdengan ketenagaansesuai standar : jumlah puskesmaskali 100	90,47	Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar (PMK No.73 Th. 2016, PMK No. 74 Th 2016, PMK No. 34 Th 2021)	%	Jumlah Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar : jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian x 100	75	Dinas Kesehatan
	Persentase Desa Siaga Aktif StrataMandiri. Kepmenkes RI Nomor 1529/ MENKES/SK/ X/2010	%	Jumlah Desa SiagaAktif strata mandiri : jumlah desa: kelurahan x 100	13,31	Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	Dinas Kesehatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	Dinas Kesehatan
	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata- rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurutumur	74,94	Dinas Kesehatan
	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	%	Jumlah capaian masing-masing indikator SPM : Jumlah indikatorSPM x 100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase tenaga kesehatan yang ber ijin (SPM)	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP :jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang ber ijin	%	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yangber ijin : jumlah sarana pelayanan kefarmasian yangada x 100	84	Dinas Kesehatan
	Rasio Posyandu Mandiri terhadapbalita	Rasio	Jumlah posyandumandiri : jumlah balita x 100	12,74	Dinas Kesehatan
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD Batang)	%	Jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standar yang seharusnya di milikix 100	100	RSUD Batang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase Capaian Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata - rata unsur capaian Peningkatan Mutudan Keselamatan Pasien	88	RSUD Batang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	99,3	RSUD Batang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	RSUD Batang
	Persentase tenaga kesehatan yang ber ijin (RSUD Batang) (SPM)	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP :jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	RSUD Batang
	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar / Jumlah gedung, sarana dan prasarana yang diadakan / jumlahgedung yang dibangun (RSUD Batang)	%	jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yangdimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standar yangseharusnya dimilikix 100	88	RSUD Batang
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD Limpung)	%	jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yangdimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standar yangseharusnya dimilikix 100	100	RSUD Limpung
	Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan (RSUD Limpung)	%	Jumlah jenis layanan SPM Bidang Kesehatan yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Bidang Kesehatan x 100	100	RSUD Limpung
	Persentase Capaian Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata-rata unsur capaian Peningkatan Mutudan Keselamatan Pasien	90	RSUD Limpung
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	99,25	RSUD Limpung
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	RSUD Limpung
	Persentase tenaga kesehatan yang ber ijin (RSUD Limpung) (SPM)	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP :jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	RSUD Limpung
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Persentase Infrastruktur Wilayah kondisiBaik	%	Jumlah infrastruktur kondisi baik : jumlah total infrastruktur x 100	74,58	DPUPR
	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik : luas irigasi kabupaten x100	74,15	DPUPR
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	%	Jumlah panjang jalan dalam kondisimantap : Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota x 100	91,5	DPUPR

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase bangunan gedung yang layak fungsi	%	Jumlah Gedung negara yang layak fungsi : Jumlah bangunan gedung negara yang menjadi kewenangan Pemkab x 100	77,01	DPUPR
	Persentase Pengaturan Rencana Detail Tata Ruang Daerah	%	Luas wilayah RDTR yang ditetapkan : Luas wilayah Kabupaten Batang x100	15,94	DPUPR
	Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Luas Wilayah berHPL/HGB	%	Luas ruang terbuka hijau : Luas wilayah ber HPL / HGB x 100	28,88	DPUPR
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun existing : luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota x 100	4,28	DPUPR
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak (SPM)	%	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x 100	100	DPUPR
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman (SPM)	%	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x 100	100	DPUPR
	Persentase TPA dalam kondisi baik	%	Jumlah TPA dalam Kondisi baik : jumlah TPA seluruhnya x 100	100	DPUPR
	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (SPM)	%	Jumlah Rumah Tangga Ber sanitasi : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x100	100	DPUPR
	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air	%	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) : Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km) x 100	71,43	DPUPR
	Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	%	Panjang jalan dan drainase lingkungan : Panjang jalan dan drainase lingkungan seluruhnya x100	59,04	DPUPR
	Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan	%	Jumlah Gedung negara yang sesuai dengan peruntukan : Jumlah Bangunan Gedung negara yang menjadi kewenangan Pemkab x 100	100	DPUPR
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40KM/Jam)	%	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik : Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut x 100	90,42	DPUPR

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	Jumlah tenaga kerja konstruksi operator dan teknis/analisis : Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota x 100	12,5	DPUPR
	Persentase Penetapan RencanaRinci Tata Ruang	%	Luas wilayah RRTRyang ditetapkan : luas wilayah RRTR yang ditargetkan x 100	81,5	DPUPR
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	89,15	DPUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	Persentase Rumah Layak Huni	%	(Jumlah Rumah Layak Huni: Jumlah Rumah se Kab. Batang) x 100	63,5	DPRKP
	Persentase perumahan dan lingkungan permukiman yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	%	(Luasan Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik :Luas Total Perumahan dan Permukiman) x 100	84	DPRKP
	Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak	%	Jumlah infrastruktur yg dipenuhi : jumlah infrastruktur yg adax 100	65	DPRKP
	Persentase pengurangan pemukiman kumuh	%	(Luas lingkungan kumuh yg tertangani : Luas lingkungan kumuhlalu) x 100	63,5	DPRKP
	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan UtilitasUmum)	%	Jumlah Perumahanyang sudah dilengkapiPSU: Jumlah Perumahan se Kab. Batang x 100	84	DPRKP
	Persentase RLH bagi korban bencana / ter dampak program pemerintah (SPM)	%	Jumlah rumah korban bencana ygditangani : JumlahRumah Korban Bencana seluruhnya x 100	100	DPRKP
	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	%	Jumlah Luas kawasan kumuh yang tertangani : Jumlah luas kawasan kumuh seluruhnya x 100	63,5	DPRKP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	70	DPRKP
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
	IKM terhadap penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks	Hasil Survei IndeksKepuasan Masyarakat	78	Satpol PP

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	(Jumlah laporan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum : jumlah keseluruhan gangguan ketentraman dan ketertiban umum) x100	78	Satpol PP
	Persentase luasan wilayah bencana kebakaran	%	(Luas wilayah bencana kebakaran : luas wilayah kabupaten) x100	3,5	Satpol PP
	Persentase penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran	%	(Jumlah penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran dalam tingkat waktu tanggap : jumlah seluruh kejadian kebakaran dan non kebakaran) x 100	73	Satpol PP
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73	Satpol PP
	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	%	Jumlah Peduduk di kawasan Rawan Bencana yang mendapat informasi Rawan Bencana/ Jumlah Penduduk di kawasan RB x 100 + Jumlah Desa Tangguh Bencana/ Jumlah Deas Rawan Bencana x 100 + Jumlah Penanganan Tanggap Darurat yang dilakukan/ JUmlah Sasaran Dampak Bencana yang dilakukan tanggap Bencana x100 + Jumlah Kejadian Bencana yng direkomendasikan Rehabilitasi dan Rekontruksi/ Jumlah Kejadian Bencana yang harus di lakukan Rehabilitasi dan Rekontruksi x 100/4	74,17	BPBD
	Persentase Penanggulangan Bencana secara cepat dan akurat	%	Jumlah bencana yang tertangani : jumlah bencana x 100	100	BPBD
	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani (SPM)	%	Jumlah laporan gangguan trantib yang tertangani : jumlah seluruh laporan gangguan trantib x 100	100	Satpol PP
	Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani (SPM)	%	Jumlah korban bencana yang ditangani / Jumlah Korban Bencana X 100	100	BPBD
	Persentase Jumlah Desa/Kel yang mendapat Pelayanan Penanggulangan Bencana (SPM)	%	(Jml desa Terkena bencana mendapat penanggulangan bencana/ Jml. desa terkena bencana) x100	100	BPBD
	Persentase waktu tanggap "respon time" (SPM)	%	Jumlah penanganan kebakaran sesuai respon time : jumlah kejadian kebakaran x 100	100	Satpol PP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	BPBD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	BPBD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
6	Sosial				
	Persentase PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak- haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga	%	Jumlah PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak- haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga : Jumlah PMKS di kab Batang X 100	76	Dinas Sosial
	Persentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	%	Jumlah PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos : Jumlah PSKS di kab batangX 100	90	Dinas Sosial
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87	Dinas Sosial
	Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten (SPM)	%	Jumlah Potensi sumber Kesejahteraan Sosial ditingkatkan kemampuannya : Jumlah PSKS di Daerah Kabupaten X 100	100	Dinas Sosial
	Persentase Warga Negara Migran korban tidak kekerasan yang berhasil dipulangkan	%	jumlah warga negara migran yang berhasil dipulangkan : Jumlah warga migran korban kekerasan x 100	45	Dinas Sosial
	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)	%	Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : Jumlah PMKS di Kabupaten Batang x 100	100	Dinas Sosial
	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial	%	Jumlah jenis layanan SPM Urusan sosial yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Urusan sosialx 100	100	Dinas Sosial
	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)	%	jumlah korban bencana alam dan sosial terpenuhi kebutuhan dasarnya : Jumlah korban bencana alam dan sosial x 100	100	Dinas Sosial
	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik : Jumlah Taman Makam Pahlawan x 100	100	Dinas Sosial
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,06	Dinas Sosial
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
1	Ketenagakerjaan				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97	Dinas Ketenagakerjaan
	Tingkat Kesempatan kerja	%	Jumlah penduduk bekerja / jumlah angkatan kerja x 100	32,01	Dinas Ketenagakerjaan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak : jumlah perusahaan x 100	100	Dinas Ketenagakerjaan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74	Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase Kegiatan yang mengacu RTK	%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD /Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten / Kota x 100	41	Dinas Ketenagakerjaan
	Rasio penduduk yang bekerja	%	Jumlah Penduduk 15 th ke atas / Angkatan Kerja x 100	14,4	Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase Pencari pekerja yang mendapat pekerjaan	%	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan : dengan jumlah pencari kerja terdaftar x 100	90	Dinas Ketenagakerjaan
	Penurunan Jumlah Perselisihan HI	Rasio	Jumlah sengketa pengusaha pekerja :jumlah perusahaanx 1000	70	Dinas Ketenagakerjaan
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	Ratio KDRT	Rasio	Jumlah KDRT :Jumlah Rumah Tangga X 100	0,0067	DP3AP2KB
	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	Pekerja anak usia 5-14 tahun : Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas x 100	0	DP3AP2KB
	Persentase cakupan pernikahan anak	%	Jumlah Pernikahan Anak : Jumlah Pernikahan X 100	4,2747	DP3AP2KB
	Persentase ARG pada belanja pelaksanaan program dan kegiatan di APBD	%	Jml ARG pada Anggaran Program Kegiatan APBD : jml seluruh anggaran pada Program Kegiatan x 100	3,4	DP3AP2KB
	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	Jml aduan kekerasan thd perempuan yg tertangani : Jml kekerasan thd perempuan yg dilaporkan x 100	100	DP3AP2KB
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	Jumlah angkatan kerja perempuan :jumlah penduduk usia kerja perempuan x 100	1,64	DP3AP2KB
	cakupan data pilah gender dan anak	%	jumlah jenis data yang tersedia : jumlah jenis data yang dibutuhkan x 100	100	DP3AP2KB
	cakupan kecamatan layak anak	%	Jml Kec yg sudah layak anak : jml kecamatan x 100	86,67	DP3AP2KB

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	Jml aduan kekerasan thd perempuan yg tertangani : Jml kekerasan thd perempuan yg dilaporkan x 100	100	DP3AP2KB
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	DP3AP2KB
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	DP3AP2KB
3	Pangan				
	Persentase penguatan cadangan pangandaerah	%	jumlah cadangan pangan tahun n dikurangi tahun n-1 : tahun n-1 x 100	0,025	Dinas Pangan dan Pertanian
	Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Ton)				
	a. Beras	Ton	Produksi Gabah Kering Panen dikurangi Angka susut (benih, pakan, tercecer, susut) dikonversidengan rendemen beras 62,74	121.734	Dinas Pangan dan Pertanian
	b. Jagung	Ton	Produksi Jagung dikurangi Angka susut atau dikalikan dengan angka konversi jagung 89	72.573,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	Cadangan Pangan Daerah (Ton)	Ton	Jumlah cadangan pangan kabupaten :standar cadangan pangan kabupaten x 100	10,7	Dinas Pangan dan Pertanian
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	12,5	Dinas Pangan dan Pertanian
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89,7	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	%	Jumlah kegiatan pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan : jumlah seluruh kegiatan ketahanan pangan x 100	17	Dinas Pangan dan Pertanian
	Skor Pola Pangan Harapan	%	Hasil kali konsumsi energi dengan bobot dibandingkan dengan Skor Maksimal Kelompok Pangan	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Rasio Desa mandiri Pangan	%	Desa yang mendapatkan fasilitas Desa Mandiri Pangan: jumlah desa di Kab.Batang x100	76,3	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	%	Jumlah daerah pengawasan keamanan pangan :jumlah daerah aman pangan x 100	67,1	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Pertanahan				

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Tingkat penurunan kasus sengketa pertanahan	%	{ (jumlah sengketa tanah tahun berkenaan - jumlah sengketa tanah tahun lalu) : jumlah sengketa tanah tahun lalu } x 100	90	DPRKP
	Persentase penyelesaian kasus pertanahan	%	(Jumlah kasus yang ditangani : Jumlah kasus yang terdaftar) x 100	100	DPRKP
	Persentase permohonan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan yang tertangani	%	jumlah permohonan yang terfasilitasi : jumlah permohonan tanah seluruhnya x 100	85	DPRKP
5	Lingkungan Hidup				
	Persentase Luas RTH	%	Luas RTH : Luas lahan x 100	70	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air	Indeks	ci baru = cim-ci (hasil pengukuran)/cim-LiJ	50	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	100-(50/0.0 x ieu-0.1)	80	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	Luas tutupan hutan : Luas wilayah administrasi	68,8	Dinas Lingkungan Hidup
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	Dinas Lingkungan Hidup
	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah	%	jumlah dokumen yang disusun : jumlah dokumen yang dibutuhkan x 100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	%	Jumlah persetujuan yang dikeluarkan : jumlah permohonan x 100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH : izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten yang ditangani /Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten x 100	65	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	%	Jumlah komunitas peduli LH yang di edukasi : Jumlah komunitas LH yang direncanakan edukasi x 100	100	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase Pendidikan Dunia yang mendapat penghargaan tingkat kabupaten	%	Jumlah Dunia Pendidikan yang memenuhi nilai standar : jumlahsekolah yang mendaftar x 100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase penanganan sampah	%	Jumlah sampah yang tertangani :jumlah timbunan sampah x 100	80	Dinas Lingkungan Hidup
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,72	Disdukcapil
	Persentase kepemilikan identitas Penduduk dan Akte Kelahiran	%	[(Jumlah Kepemilikan KIA : Jumlah Peduduk usia 0-17 th) + (Jumlah Penduduk Ber-KTP el : JumlahPeduduk usia di atas 17 th) + (jumlah penduduk ber-akta kelahiran usia 0-18 th : jumlah penduduk usia 0-18 th) : 3] x 100	88,33	Disdukcapil
	Persentase menurunnya data ganda dan anomali	%	[(Jumlah Data ganda dan anomali tahun lalu - data ganda dan anomali tahun ini) : jumlah data ganda dan anomali tahun lalu]x 100	2	Disdukcapil
	Persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	%	[(Jumlah pendudukmemiliki KTP el : Jumlah penduduk usia 17 th ke atas) +(Jumlah penduduk memiliki KIA : jumlah penduduk dibawah usia 17 th) : 2] x 100	94,5	Disdukcapil
	Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir	%	[(Jumlah kepemilikan akta nikah : jumlah pemohon) + (jumlahakta usia bayi 0-5 th : penduduk usia0-5 th) : 2] x 100	97,6	Disdukcapil
	Persentase penyajian data kependudukan yangvalid	%	(Jumlah data kependudukan yangvalid : jumlah seluruh data kependudukan) x 100	95,6	Disdukcapil
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	Disdukcapil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	jumlah desa maju :total jumlah se kab.batang x 100	24	Dispermades
	Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	Penilaian IndeksDesa Mandiri Terendah	0,57	Dispermades
	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	Penilaian IndeksDesa Mandiri Terendah	0,81	Dispermades
	Indeks Ketahanan Ekologi	Indeks	Penilaian IndeksDesa Mandiri Terendah	0,51	Dispermades
	Persentase sumbangan pendapatanperempuan	%	Jumlah pkk desa binaan : pkk desa se kab. Batang x 100	62,76	Dispermades

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Dispermades
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68	Dispermades
	Persentase budaya desa yang dilestarikan	%	jumlah adat dan budaya desa yang dilestarikan : jumlah adat budayadesa x 100	60	Dispermades
	Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	Desa	jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya : total desa di Kabupaten Batang x100	56,49	Dispermades
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa	%	jumlah LKD yang aktif : jumlah LKD keseluruhan x 100	75	Dispermades
8	Pengendalian Penduduk dan KB				
	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	$r = \{Pt/P0\} \times (1/t) - 1\} \times 100$ r = laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah Penduduk tahun t P0 = Jumlah penduduk tahun dasar t = selisih tahun Ptdengan P0	1,12	DP3AP2KB
	TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total)	Index	5 Σ ASFR	2,9	DP3AP2KB
	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana	%	Jml jenis data kependudukan bid KB : Target jml jenis data kependudukan bid. KB x 100	100	DP3AP2KB
	Peningkatan Cakupan Kesertaan Ber-KB	%	PUS yang ber-KB :Jum. PUS x 100	74	DP3AP2KB
	Cakupan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL)	%	Jumlah keluarga yang didampingi kelompok Tribina	78,71	DP3AP2KB
9	Perhubungan				
	Rasio ijin trayek	Rasio	jumlah ijin trayek yang dikeluarkan :jumlah penduduk	1,5	Dinas Perhubungan
	Tingkat kelancaran dan keamanan lalu lintas	Rasio	v / c ratio JalanKabupaten v : volumekendaraan c : kapasitas jalan	0,5	Dinas Perhubungan
	Persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat	%	Jumlah kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang dilaksanakan : jumlah kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang ditetapkan x 100	87	Dinas Perhubungan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	Dinas Perhubungan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	Dinas Perhubungan
10	Komunikasi dan Informatika				
	Indeks SPBE	Indeks	Domain SPBE	3,55	Diskominfo
	Indeks Smart City	Indeks	Dimensi Smart City	3,48	Diskominfo
	Persentase informasi dan komunikasi publik yang bisa diakses lewat media komunikasi	%	Jumlah informasi yang diakses publik : dengan jumlah penyebaran informasi x 100	100	Diskominfo
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,5	Diskominfo
	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	%	Jumlah informasi yang diakses publik : jumlah penyebaran informasi x 100	72	Diskominfo
	Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	%	Jumlah layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi : jumlah layanan x 100	73	Diskominfo
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	Diskominfo
11	Koperasi dan UKM				
	Persentase koperasi aktif	%	(jumlah koperasi aktif : jumlah koperasi keseluruhan) x 100	68	Disperindagk op dan UKM
	Persentase peserta pelatihan dengan predikat baik	%	(jumlah peserta pelatihan/diklat yang lulus : jumlah peserta pelatihan/diklat) x 100	100	Disperindagk op dan UKM
	Persentase peserta diklat dengan predikat baik	%	(jumlah peserta pelatihan/diklat yang lulus : jumlah peserta pelatihan/diklat) x100	100	Disperindagk op dan UKM
	Persentase Pertambahan WiraUsaha Baru	%	(jumlah UMKM Baru tahun n - jumlah UMKM tahun n-1) : jumlah UMKM tahun n-1 } x 100	12	Disperindagk op dan UKM
	Persentase produk UMKM yang terstandarisasi	%	Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N - Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N-1) :Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N-1) X 100	20	Disperindagk op dan UKM
12	Penanaman Modal				

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	(Investasi tahunlalu : investasi tahun ini) x 100	80	DPMPTSP
	Jumlah Nilai Realisasi InvestasiPMA/PMDN	Trilyun	Jumlah perusahaan yang berinvestasi dibatang	2,5	DPMPTSP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	DPMPTSP
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	DPMPTSP
	Persentase peningkatan jumlah investor	%	Jumlah investor tahun n dikurangi Jumlah investor tahun (n-1) : jumlah investor tahun n x 100	60	DPMPTSP
	Persentase promosi di kabupaten Batang	%	Jumlah promosi yang direncanakan : jumlah promosi yang dilaksanakan x100	100	DPMPTSP
	Persentase ijin yang diterbitkan	%	Jumlah pemohon ijin usaha : jumlah ijin yang diterbitkan x 100	100	DPMPTSP
	Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal	%	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM : jumlah perusahaan	8	DPMPTSP
	Persentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia	%	Jumlah pemberian pelayanan data : jumlah pemohon data x 100	45	DPMPTSP
13	Kepemudaan dan Olahraga				
	Jumlah medali yang diperoleh	Medali	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	40	Disparpora
	Persentase peningkatan pemuda berprestasi	%	{(Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n – Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n- 1) : Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n-1} x 100	4	Disparpora
	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	jumlah organisasi kepemudaan yang dibina : jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar x 100	39	Disparpora
	capaian medali kejuaraan	Medali	Jumlah total medali yang didapat selama 1 Tahun	45	Disparpora
	Penghargaan yang diterima	%	Jumlah penghargaan yang diterima : jumlah kegiatan yang diikuti X 100	10	Disparpora
14	Statistik				

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	%	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi : dengan jumlah data statistik sektoral yang terkumpul x 100	100	Diskominfo
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi / Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul x 100	100	Diskominfo
15	Persandian				
	Indeks Keamanan Informasi	%	Jumlah sistem elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan : dengan jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun x 100	100	Diskominfo
	Persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya	%	Jumlah Sistem Elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan : dengan jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun x 100	100	Diskominfo
16	Kebudayaan				
	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	%	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan : jumlah keseluruhan cagar budaya x 100	100	Disdikbud
	Persentase pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	%	Jumlah pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah : Jumlah target pengunjung kesenian tradisional yang diselenggarakan x 100	75	Disdikbud
	Persentase festival seni yg dilaksanakan	%	jumlah festival seni yang diselenggarakan pada tahun berjalan (n) : jumlah festival seni yang ditargetkan x 100	100	Disdikbud
	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	%	jumlah komunitas /sanggar kesenian yang difasilitasi : jumlah komunitas /sanggar seni yang terdaftar x 100	75	Disdikbud
17	Perpustakaan				
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	$TGM = (0,3 \times (FM + DM + JB)) + 0,05 \times (FAI + DAI)$	66,37	Disperpuska
	indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	$IPLM = \sum UPLM / AM$	2,9	Disperpuska
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0,16	Disperpuska

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	61,2	Disperpuska
	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan pertahun	%	(Jumlah peningkatan pengunjung : Jumlah pengunjung tahun sebelumnya) x 100	87,69	Disperpuska
18	Kearsipan				
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Indeks	$T=(a+i+s+j)/4$ T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	75,5	Disperpuska
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Indeks	$T=(m+b+g+a+c+i)/6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	22,6	Disperpuska
	Urusan Pilihan				

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
1	Kelautan dan Perikanan				
	Indeks tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang dilaksanakan	Indeks	nilai rata- rata Indeks semua pelayanan yang dilaksanakan	85	Dislutkannak
	Kontribusi sektor Perikanan dan Peternakan terhadap PDRB ADHK	%	data dari bps (dirilis setiap bulan february)	21,95	Dislutkannak
	Persentase Capaian Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	%	Capaian produksi perikanan tangkap ditambah perikanan budidaya pada tahun n : target produksi perikanan tangkap ditambah target produksi perikanan budidayax 100	97	Dislutkannak
	Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan	%	Capaian tingkat konsumsi makan ikan pada tahun n : target tingkat konsumsi makan ikan x 100	98	Dislutkannak
	Capaian Bina Kelompok Masyarakat Pengawas	%	(Realisasi Jumlah Pokmaswas yang Diberdayakan : Target) x 100	100	Dislutkannak
	Persentase Capaian Tingkat konsumsi makan ikan	%	(Realisasi Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan : Target Tingkat Konsumsi Makan Ikan) x 100	98	Dislutkannak
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	Dislutkannak
2	Pariwisata				
	Persentase Peningkatan kunjungan Wisatawan	%	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1 : Jumlah wisatawan tahun n-1) x 100	23	Disparpora
	Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	(Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n dikurangi Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1 : Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1 x 100	15	Disparpora
	Persentase inovasi ekonomi kreatif	%	(jumlah inovasi produk ekonomi kreatif : jumlah produk ekonomi kreatif/kajian yang dilaksanakan) x 100	12	Disparpora
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	Disparpora
	Persentase jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	%	jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki HAKI : jumlah produk ekonomi kreatif yang terdaftar X 100	25	Disparpora
	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	%	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat : Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif X 100	40	Disparpora

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	Disparpora
3	Pertanian				
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	%	jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian : Jumlah PDRB x 100	24,77	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	Jumlah produksi pertanian (Pangan, Horti da Perkebunan) per hektar per tahun : luas panen x 100	0,0108	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Produksi Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu)	%	Capaian produksi tahun n : target produksi tahun n x100	90	Dislutkannak
	Persentase Hewan / Ternak yang Terobati	%	Capaian hewan ternak terobati padatahun berjalan : target capaian hewan ternak terobati x 100	100	Dislutkannak
	Capaian Jumlah Hewan yang Terobati	%	(Realisasi Jumlah Hewan yang Terobati di Puskesmas : Target Hewan yang Terobati di Puskesmas) x 100	100	Dislutkannak
	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	%	(jumlah daerah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian : jumlah seluruh daerah yang terkena bencana pertanian)*100	100	Dislutkannak
	Persentase Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan	%	(Realisasi Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan : Target)x 100	100	Dislutkannak
	Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian	%	jumlah Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian yang mengikuti pelatihan : jumlah Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha di Kabupatenx 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase validitas data Pertanian	%	jumlah kesesuaian data yang tervalidasi : jumlah kesesuaian data yang ada x 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase kenaikan pelaksanaan penyelenggaraan Penyuluhan	%	jumlah data laporan yang tersedia : jumlah BPP x 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun	%	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun : luas panenX 100	0,0108	Dinas Pangan dan Pertanian

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	%	realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian : rencana kegiatan pembangunan prasarana pertanianX 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	%	(jumlah daerah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian : jumlah seluruh daerah yang terkena bencana pertanian)*100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Perdagangan				
	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	%	Data BPS	13,24	Disperindagk op dan UKM
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68	Disperindagk op dan UKM
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Disperindagk op dan UKM
	Persentase Verifikasi Teknis	%	Jumlah verifikasi teknis : Jumlah yang pengajuan x100	100	Disperindagk op dan UKM
	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	jumlah pasar rakyat dan Shelter PKL yang direvitalisasi/renovasi : jumlah pasar rakyat dan Shelter PKL keseluruhan x 100	36,36	Disperindagk op dan UKM
	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga	%	barang pokok yang stabil harganya : seluruh barang kebutuhan pokok x100	75	Disperindagk op dan UKM
	nilai ekspor perdagangan	USD	nilai ekspor perdagangan -nilai impor pada tahun n kabupaten kota	60.215.421	Disperindagk op dan UKM
	Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	Jumlah UTTP bertera /tera ulang :Potensi UTTP x 100	75	Disperindagk op dan UKM
	Persentase Pelaksanaan Pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang	%	Jumlah Pelaksanaan pameran : jumlah pameran yang direncanakan x 100	100	Disperindagk op dan UKM
5	Perindustrian				
	Persentase peningkatan jumlah pelaku IKM	%	jumlah pelaku IKM tahun n- jumlah pelaku IKM tahun n-1) : jumlah pelaku IKM tahun n-1 x 100	0,0079	Disperindagk op dan UKM
	Persentase peningkatan jumlah perijinan berusaha sektor industri	%	jumlah izin usaha tahun n- jumlah izin usaha tahun n-1) : jumlah izin usaha tahun n-1 x100	86	Disperindagk op dan UKM

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase jumlah Industri dalam SIINas	%	jumlah Industri dalam SIINas tahunn- jumlah Industri dalam SIINas tahunn-1) : jumlah Industri dalam SIINas tahun n- 1 x100	86	Disperindagk op dan UKM
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
1	Sekretariat Daerah				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	Sekretariat Daerah
	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP	%	Jumlah PD yang mendapat nilai B : jumlah PD yang adax 100	85	Sekretariat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5	Sekretariat Daerah
	Nilai EKPPD	Skor	Nilai hasil evaluasiLPPD nasional menurut Kemendagri	2,99	Sekretariat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu	%	Jumlah tersusunnya LPPD tepat waktu : jumlah keseluruhanLPPD perangkat daerah x 100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi	%	Jumlah penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi : jumlah keseluruhan administrasi tata pemerintahan x 100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	jml kegiatan yang terlaksana : jml kegiatan yg direncanakan x 100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi	%	(realisasi persentase penyusunan produk hukum daerah yangberhasil difasilitasi + persentase perkara hukum yang terselesaikan + tase penyediaan informasi produk) : (persentase target penyusunan produk hukum daerah yang berhasil difasilitasi + tase perkara hukum yang terselesaikan + persentase penyediaan informasi produk hukum) x 100	95	Sekretariat Daerah
	Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal)	%	(Jumlah deviden : Jumlah PenyertaanModal) x 100	15	Sekretariat Daerah
	Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti : jumlah kebijakanyang dikeluarkan baik pusat atau daerah)* 100	100	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target	%	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan : Jumlah seluruh paket pekerjaan yang direncanakanx 100	97	Sekretariat Daerah
	Persentase lelang melalui e- procurement	%	Jumlah Paket yang dilelang : Jumlah Total Rencana Paket Lelang x 100	100	Sekretariat Daerah
	Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Skor	Total nilai kematangan PD : jumlah PD	36 (sedang)	Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	Jumlah PD yang mendapat telah menerapkan SOP : jumlah PD x 100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase kegiatan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi Kepala Daerah	%	Jumlah kegiatan pimpinan yang terfasilitasi : jumlah permohonan fasilitasi kegiatan pimpinan x 100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	%	Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional KDH dan WKDH, Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda : target x 100	90	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD				
	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Hasil Survey/Kuesioner Kepuasan AnggotaDPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	79	Sekretariat DPRD
	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Hasil Survey/Kuesioner Kepuasan AnggotaDPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	100	Sekretariat DPRD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	Sekretariat DPRD
	Persentase Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan	%	Capaian Peraturan Daerah non APBD yang terbentuk : target Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan pertahun x 100 (ket: target Perda non APBD yang ditetapkan per tahun sebanyak 5 Perda)	100	Sekretariat DPRD
	Persentase KUA/PPA dan Perda APBD yang ditetapkan	%	Capaian Peraturan Daerah APBD yang terbentuk : target Peraturan Daerah APBD yang ditetapkan per tahun x 100 (ket: target Perda APBD yang ditetapkan pertahun sebanyak 3 Perda, dan 2 Perbup KUA/PPA)	100	Sekretariat DPRD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana dan Kode Etik DPRD	%	Capaian kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana : target kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan x 100(target sesuai jumlah kegiatan pengawasan yang dijadwalkan per tahun)	100	Sekretariat DPRD
	Persentase peningkatan kapasitas Anggota DPRD	%	Rata-rata capaian kinerja fasilitasi kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	100	Sekretariat DPRD
	Persentase penyerapan aspirasi masyarakat	%	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD per tahun : jumlah seluruh anggota DPRD x 100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase fasilitasi tugas Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD	%	Jumlah kegiatan Alat Kelengkapan Dewan yang difasilitasi : jumlah kegiatan Alat Kelengkapan Dewan yang dijadwalkan x 100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD	%	Jumlah kegiatan administrasi Dewan yang difasilitasi : jumlah kegiatan administrasi Dewan yang dijadwalkan x 100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	Jumlah anggota DPRD yang mendapat layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD : jumlah Anggota DPRD x 100	100	Sekretariat DPRD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Sekretariat DPRD
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
1	Perencanaan				
	Indeks Perencanaan	Indeks	60 Capaian sasaran pemda+20 sasaran perangkat daerah+20 capaian program daerah	79	Bapelitbang
	Persentase sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	%	(Jumlah sasaran pembangunan daerah yang mencapai target : total sasaran pembangunan daerah) x 100	91	Bapelitbang
	Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	%	Jumlah Program dalam RKPD : Jumlah Program dalam APBD X 100	100	Bapelitbang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63.00.00	Bapelitbang
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu		Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia tepat waktu : jumlah dokumen yang dihasilkan x 100	100	Bapelitbang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan	%	jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang dievaluasi : jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang dihasilkan x 100	100	Bapelitbang
	Persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah	%	jumlah elemen data/informasi yang tersedia : jumlah elemen data/informasi yang dibutuhkan sebagai bahan analisis x100	100	Bapelitbang
	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang PSDA yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PSDA yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PSDA) x 100	91	Bapelitbang
	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PPM yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PPM) x 100	91	Bapelitbang
	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang IPW yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. IPW yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. IPW) x 100	91	Bapelitbang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,8	Bapelitbang
2	Keuangan				
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Status	OPINI	WTP	BPKPAD
	Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	%	(Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP / jumlah total OPD) x 100	100	BPKPAD
	Persentase peningkatan pendapatan daerah	%	[(Realisasi Pendapatan Daerah tahun n)-(Realisasi Pendapatan Daerah Tahun n-1)] : (Realisasi Pendapatan Daerah Tahun n-1) x 100	0,5	BPKPAD
	Persentase Peningkatan PAD	%	[(Realisasi PAD tahun n)-(Realisasi PAD Tahun n-1)]/(Realisasi PAD Tahun n-1) x 100	1,36	BPKPAD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64,5	BPKPAD
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	BPKPAD
	Penyampaian Raperda APBD tepat waktu	Status	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	BPKPAD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase tersusunnya dataaset Pemda menurut lokasi, kepemilikan, pemnfaatan dan kondisinya	%	Dokumen KIB per SKPD se KabupatenBatang	100	BPKPAD
	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	%	$[(\text{Realisasi tahun } n) - (\text{Realisasi tahun } n-1)] / \text{Realisasi tahun } n-1 \times 100$	2,03	BPKPAD
	Penyampaian Raperda Pertanggungjawab an tepat waktu	Status	Tepat waktu/tidaktepat waktu	Tepat waktu	BPKPAD
	Persentase Realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja	%	realisasi belanja : anggaran belanja x 100	90	BPKPAD
3	Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan				
	Nilai Sistem Merit	Skor	(Jumlah Skor x Bobot dalam setiapaspek)	225	BKD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	BKD
	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Skor	$(\text{Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter} : \text{Total Parameter Yang Terisi}) \times (1 / \text{jumlah parameter}) \times \text{Nilai Dasar } 25$	87	BKD
	Persentase ASN dengan nilai kinerja kriteria "baik"	%	$(\text{Jumlah ASN Kab Batang yang memiliki Kinerja} \times : \text{Jumlah ASN Kab.Batang}) \times 100$	100	BKD
	Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas	%	$(\text{Jumlah realisasi ASN yg dilatih} : \text{Jumlah Pendaftar Pelatihan}) \times 100$	80	BKD
	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu	%	$(\text{Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu} : \text{Jumlah semua layanan administrasi kepegawaian yang ada}) \times 100$	100	BKD
	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target	%	$(\text{jumlah indikator program prioritas PD lingkup sub koordinator diklat yang mencapai target} : \text{jumlah indikator program prioritas PD lingkupsub koordinator diklat}) \times 100$	100	BKD
4	Penelitian Pengembangan				
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	ISP+rata-rata ISI	63.00.00	Bapelitbang
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	$(\text{Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan} : \text{Jumlah total hasil kelitbangan}) \times 100$	100	Bapelitbang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	(Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah : jumlah total perangkat daerah) x 100	100	Bapelitbang
	Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah rekomendasi utama kegiatan kelitbangan yg mjd bahan masukan penyusunan renja :Kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan) x100	60	Bapelitbang
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
1	Pengawasan				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	Jumlah laporan hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti : jumlah laporan hasil pengawasan x100	85	Inspektorat Daerah
	Persentase pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	%	pencapaian nilai kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya x 100	85	Inspektorat Daerah
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	jumlah laporan pengaduan masyarakat yg terselesaikan : jumlah laporan pengaduan masyarakat tahun berjalan x 100	85	Inspektorat Daerah
	Persentase Jumlah Pemeriksaan Yang Dilakukan	%	Jumlah LHP yang diterbitkan dibandingkan jumlah obrik x 100	100	Inspektorat Daerah
	Level SPIP	Level	kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya dalam satu tahun anggaran	3	Inspektorat Daerah
	Persentase kapabilitas APIP	%	kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya dalam satu tahun anggaran	70	Inspektorat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	Inspektorat Daerah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	Inspektorat Daerah
	Unsur Kewilayahan				
1	Kecamatan Batang				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Batang
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Majudan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	60	Kecamatan Batang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	Kecamatan Batang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Majudan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Majudan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	60	Kecamatan Batang
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Batang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	Kecamatan Batang
	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	(Usulan yang masuk perankingan : Jumlah Usulan Perencanaan) x 100	100	Kecamatan Batang
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif :Jumlah LKD) x 100LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Batang
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Batang
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalamrangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakorforkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Batang
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Batang
2	Kecamatan Banyuputih				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Banyuputih
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Majudan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	65	Kecamatan Banyuputih
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	Kecamatan Banyuputih
	Jumlah Desa dengan Status majudan Mandiri	Desa	Jumlah Desa dengan Status majudan Mandiri	5	Kecamatan Banyuputih
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Banyuputih
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	Kecamatan Banyuputih
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Banyuputih

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif :Jumlah LKD) x 100LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Banyuputih
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Banyuputih
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalamrangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Banyuputih
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yangtertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaankeuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Banyuputih
3	Kecamatan Bandar				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap PelayananPublik	3,01 (B)	Kecamatan Bandar
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Majudan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	41,18	Kecamatan Bandar
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,15	Kecamatan Bandar
	Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Majudan Mandiri tiap tahun	Desa	Jumlah desa dengan status majudan mandiri	7	Kecamatan Bandar
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Bandar
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	Kecamatan Bandar
	Persentase pelayanan PATENyang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Bandar
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif :Jumlah LKD) x 100LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Bandar
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Bandar
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalamrangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakorforkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Bandar

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Bandar
4	Kecamatan Bawang				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Bawang
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(jumlah Desa yang mencapai target : jumlah desa seluruhnya) x 100	80	Kecamatan Bawang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Kecamatan Bawang
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	75	Kecamatan Bawang
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Bawang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	Kecamatan Bawang
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Bawang
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Bawang
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Bawang
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Bawang
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Bawang
5	Kecamatan Blado				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Blado
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	38,8	Kecamatan Blado
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Kecamatan Blado

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Majudan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Majudan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	38,8	Kecamatan Blado
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Blado
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Kecamatan Blado
	Persentase pelayanan PATENyang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Blado
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif :Jumlah LKD) x 100LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Blado
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Blado
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalamrangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakorforkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Blado
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yangtertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaankeuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Blado
6	Kecamatan Gringsing				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap PelayananPublik	3,01 (B)	Kecamatan Gringsing
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Majudan Desa Mandiri :Jumlah Desa) x 100	80	Kecamatan Gringsing
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	89	Kecamatan Gringsing
	Persentase JumlahDesa Berkembang menjadi Desa Majudan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Majudan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	66,6	Kecamatan Gringsing
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Gringsing
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67	Kecamatan Gringsing
	Persentase pelayanan PATENyang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Gringsing

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif :Jumlah LKD) x 100LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Gringsing
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Gringsing
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Gringsing
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalamrangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakorforkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	90	Kecamatan Gringsing
7	Kecamatan Kandeman				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap PelayananPublik	3,50 (B)	Kecamatan Kandeman
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Majudan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Kandeman
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Kecamatan Kandeman
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Majudan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	90	Kecamatan Kandeman
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Kandeman
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	Kecamatan Kandeman
	Persentase pelayanan PATENyang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Kandeman
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif :Jumlah LKD) x 100LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Kandeman
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Kandeman
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalamrangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakorforkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Kandeman

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Kandeman
8	Kecamatan Limpung				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Limpung
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70,59	Kecamatan Limpung
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Kecamatan Limpung
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	47,06	Kecamatan Limpung
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Limpung
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68	Kecamatan Limpung
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Limpung
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Limpung
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Limpung
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Limpung
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Limpung
9	Kecamatan Pecalungan				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Pecalungan
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	80	Kecamatan Pecalungan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Kecamatan Pecalungan
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Majudan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Pecalungan
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Pecalungan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Kecamatan Pecalungan
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Pecalungan
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif :Jumlah LKD) x 100LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Pecalungan
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Pecalungan
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakorforkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Pecalungan
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Pecalungan
10	Kecamatan Reban				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Reban
	Persentase Status Desa Maju dan Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Majudan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	36,84	Kecamatan Reban
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	Kecamatan Reban
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Majan Mandiri tiap tahun	%	Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Majudan Mandiri/ Jumlah Desa) x 100	75	Kecamatan Reban
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Reban
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90	Kecamatan Reban

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Reban
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif :Jumlah LKD) x 100LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	Kecamatan Reban
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Reban
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Reban
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	90	Kecamatan Reban
11	Kecamatan Subah				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Subah
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(jumlah Desa yang Maju dan Mandiri :jumlah desa seluruhnya) x 100	35,29	Kecamatan Subah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Kecamatan Subah
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Majudan Desa Mandiri :Jumlah Desa) x 100	35,29	Kecamatan Subah
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Subah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	Kecamatan Subah
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Subah
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif :Jumlah LKD) x 100LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Subah
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Subah
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Subah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Subah
12	Kecamatan Tersono				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Tersono
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Majudan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	80	Kecamatan Tersono
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,5	Kecamatan Tersono
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Majudan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Majudan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	75	Kecamatan Tersono
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tersono
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	Kecamatan Tersono
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Tersono
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Tersono
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tersono
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Tersono
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Tersono
13	Kecamatan Tulis				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,80 (SB)	Kecamatan Tulis
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Majudan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Tulis

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	Kecamatan Tulis
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Tulis
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tulis
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Kecamatan Tulis
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Tulis
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Tulis
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tulis
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Tulis
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x 100	90	Kecamatan Tulis
14	Kecamatan Warungasem				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Warungasem
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	80	Kecamatan Warungasem
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Kecamatan Warungasem
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	85	Kecamatan Warungasem
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Warungasem
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Kecamatan Warungasem

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Persentase pelayanan PATENyang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Warungasem
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif :Jumlah LKD) x 100LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Warungasem
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Warungasem
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Warungasem
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalamrangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	90	Kecamatan Warungasem
15	Kecamatan Wonotunggal				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap PelayananPublik	3,01 (B)	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Majudan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	33,3	Kecamatan Wonotunggal
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	3,42	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase JumlahDesa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiaptahun	%	(Jumlah Desa Majudan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	46,6	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Wonotunggal
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase pelayanan PATENyang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif :Jumlah LKD) x 100LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu,RT, RW	90	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Wonotunggal

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Wonotunggal
	Unsur Pemerintahan Umum				Bakesbangpo 1
	Indeks Kerukunan	%	Dilakukan Survey (Toleransi+Kesetaraan+Kerjasama) : 3*100	80	Bakesbangpo 1
	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	Skor	Nilai hasil evaluasi mplementasi SAKIP oleh Kemenpan RB	72	Bakesbangpo 1
	Persentase demo tertangani	%	(jumlah demo tertangani : jumlah demo yang ada)*100	100	Bakesbangpo 1
	Persentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi	%	(jumlah konflik sosial tahun berkenaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) * 100	100	Bakesbangpo 1
	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung Pemerintah	%	(Jumlah Parpol dan Lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam mendukung pemerintah : jumlah parpol dan lembaga pendidikan dibatang) x 100	95	Bakesbangpo 1
	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	%	(Jumlah Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan : Jumlah Ormas yang terdaftar resmi) x 100	100	Bakesbangpo 1
	Persentase masyarakat yang paham tentang ketahanan Ekososbud	%	(Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan paham terhadap ketahanan Ekosbud : jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi) x 100 (Melalui Pretest dan postest)		Bakesbangpo 1
	Persentase penurunan konflik sosial	%	(Jumlah konflik sosial tahun berkenaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) x 100	100	Bakesbangpo 1
	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung Pemerintah	%	(Jumlah Parpol dan Lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam mendukung pemerintah : jumlah parpol dan lembaga pendidikan di batang) x 100	100	Bakesbangpo 1

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang, 2025

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 3.3
Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka Rata-Rata Lama sekolah	tahun	jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalanipendidikan formal	7,2
		Angka Harapan Sekolah	tahun	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	12,5
		Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk	%	persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan	80,5
		Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	%	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan : jumlah keseluruhan cagar budaya x 100	100
		Persentase pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	%	Jumlah pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah : Jumlah target pengunjung kesenian tradisional yang diselenggarakan x 100	75
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79
2	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu(AKI)	Per 100.000 KH	Jumlah kematianibu maternal tetapi bukan disebabkan karena kecelakaan, bencana, cidera atau bunuh diri	112

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
				di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1.000	7,6
		Angka prevalensi balita stunting	%	Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan status pendek di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah Balita usia 0-59 bulan yang diukur panjang atau tinggi badan pada wilayah dan kurun waktu yang sama x 100	13,61
		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	74,94
		Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan (UU No. 40 Th 2004 dan UU No.36 Th 2009)	%	Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan : jumlah penduduk x 100	90
		Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar (PMK 43. Th 2019)	%	Jumlah puskesmas dengan ketenagaan sesuai standar : jumlah puskesmas kali 100	90,47
		Persentase Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar (PMK No.73 Th. 2016, PMK No. 74 Th 2016, PMK No. 34 Th 2021)	%	Jumlah Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar : jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian x 100	75

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri. Kepmenkes RI Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010	%	Jumlah Desa Siaga Aktif strata mandiri : jumlah desa: kelurahan x100	13,31
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
3	RSUD Batang	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	Jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standar yang seharusnya di miliki x 100 persen	88
		Persentase Capaian Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata - rata unsur capaian Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	88
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99.30
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
4	RSUD Limpung	Persentase Capaian Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standar yang seharusnya dimiliki x 100	93
		Persentase Capaian Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata-rata unsur capaian Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,25
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Infrastruktur Wilayah kondisi Baik	%	Jumlah infrastruktur kondisi baik : jumlah total infrastruktur x100	74,58

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik : luas irigasi kabupaten x 100	74,15
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	%	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap : Jumlah total panjang jalan kabupaten: kota x 100	91,5
		Persentase bangunan gedung yang layak fungsi	%	Jumlah Gedung negara yang layak fungsi : Jumlah bangunan gedung negara yang menjadi kewenangan Pemkab x 100	77,01
		Persentase Pengaturan Rencana Detail Tata Ruang Daerah	%	Luas wilayah RDTR yang ditetapkan : Luas wilayah Kabupaten Batang x 100	15,94
		Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB	Rasio	Luas ruang terbuka hijau : Luas wilayah ber HPL : HGB x 100	28,88
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66,94
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	(Jumlah Rumah Layak Huni : Jumlah Rumah se Kab. Batang) x 100	63,5
		Persentase perumahan dan lingkungan permukiman yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	%	(Luasan Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik : Luas Total Perumahan dan Permukiman) x 100	84
		Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak	%	Jumlah infrastruktur yg dipenuhi : jumlah infrastruktur yg ada lalu x 100	65
		Persentase pengurangan permukiman kumuh	%	(Luas lingkungan kumuh yg tertangani : Luas lingkungan kumuh lalu) x 100	63,5

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Tingkat penurunan kasus sengketa pertanahan	%	{ (jumlah sengketa tanah tahun berkenaan - jumlah sengketa tanah tahun lalu) : jumlah sengketa tanah tahun lalu } x 100	90
		Persentase penyelesaian kasus pertanahan	%	(Jumlah kasus yang ditangani : Jumlah kasus yang terdaftar) x100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78
		Persentase penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	(Jumlah laporan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum : jumlah keseluruhan gangguan ketentraman dan ketertiban umum) x 100	78
		Persentase luasan wilayah bencana kebakaran	%	(Luas wilayah bencana kebakaran : luas wilayah kabupaten) x 100	3,5
		Persentase penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran	%	(Jumlah penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran dalam tingkat waktu tanggap : jumlah seluruh kejadian kebakaran dan non kebakaran) x 100	73
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kerukunan	%	Survei melalui 3 komponen yaitu :	73
				(Toleransi + kesetaraan + kerjasama) : 3 x100	80
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71
		Persentase demo tertangani	%	(jumlah demo tertangani : jumlah demo yang ada) x 100	100
		Persentase potensi gangguan/ konflik sosial keagamaan yang teratasi	%	(jumlah konflik sosial tahun berkenaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) x100	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	%	Jumlah Peduduk dikawasan Rawan Bencana yang mendapat informasi Rawan Bencana: Jumlah Penduduk dikawasan RB x 100 + Jumlah Desa Tangguh Bencana: Jumlah Desa Rawan Bencana x100 + Jumlah Penanganan Tanggap Darurat yang dilakukan: Jumlah Sasaran Dampak Bencanayang dilakukan tanggap Bencana x100 +Jumlah Kejadian Bencana yang direkomendasikan Rehabilitasi dan Rekontruksi: Jumlah Kejadian Bencana yang harus di lakukan Rehabilitasi dan Rekontruksi x 100 : 4	74,17
		Persentase Penanggulangan Bencanasecara cepat dan akurat	Indeks	Jumlah bencana yang tertangani : jumlah bencana x100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
10	Dinas Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan , jaminan sosial, dapathidup mandiri, dan berfungsi sosial	%	Jumlah PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak- haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga : Jumlah PMKS di kab Batang X 100	76
		Persentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	%	Jumlah PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos : Jumlah PSKS di kab batang X 100	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,06
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
11	Dinas Tenaga Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
		Tingkat Kesempatan kerja	%	Jumlah penduduk bekerja : jumlah angkatan kerja x 100	97
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	Perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak : jumlah perusahaan x 100	32,01
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
		Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	Jumlah indikator sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target : Jumlah indikator sasaran strategis Perangkat Daerah x 100	70
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	$r = \{Pt: P0\} \times (1:t)-1\} \times 100$	80
				r = laju pertumbuhan penduduk	
				Pt = Jumlah Penduduk tahun t	
				P0 = Jumlah penduduk tahun dasar	
				t = selisih tahun Pt dengan P0	
		TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total)	Indeks	5 Σ ASFR	4,2747
		Ratio KDRT	Rasio	Jumlah KDRT: Jumlah Rumah Tangga X 100	89,15
		Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	Pekerja anak usia 5-14 tahun : Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas x 100	81
		Persentase cakupan pernikahan anak	%	Jumlah Pernikahan Anak : Jumlah Pernikahan X 100	70
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	50
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80
13	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Luas RTH	%	Luas RTH: Luas lahan x 100	68,8

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Indeks Kualitas Air	Indeks	ci baru = cim-ci(hasil pengukuran): cim-LiJ	63
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	100-(50: 0.0 x ieu-0.1)	95
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	Luas tutupan hutan: Luas wilayah administrasi	24
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0,57
		Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	jumlah indikator yang mencapai target: Jumlah indikator x 100	0,81
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0,51
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	jumlah desa maju : total jumlah sekab. batang x 100	62,76
		Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	90
		Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	68
		Indeks Ketahanan Ekologi	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	91,72
		Persentase pkk aktif	%	Jumlah pkk aktif : jumlah pkk x 100	88,33
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1,5
		Persentase kepemilikan identitas Penduduk dan Akte Kelahiran	%	[(Jumlah Kepemilikan KIA :Jumlah Peduduk usia 0-17 th) + (Jumlah Penduduk Ber- KTP el : Jumlah Peduduk usia di atas 17 th) + (jumlah penduduk ber- akta kelahiran usia 0-18 th : jumlah penduduk usia 0-18 th) : 3] x 100	0,5

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Menurunnya Presentasi Data Ganda dan Anomali	%	[(Jumlah Data ganda dan anomali tahun lalu - data gandadan anomali tahun ini) : jumlah data ganda dan anomali tahun lalu] x 100	89,15
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
16	Dinas Perhubungan	Rasio ijin trayek	rasio	jumlah ijin trayek yang dikeluarkan: jumlah penduduk	3,55
		Tingkat kelancaran dan keamanan lalu lintas	rasio	v / c ratio Jalan Kabupaten	3,48
				v : volume kendaraan	100
				c : kapasitas jalan	100
					100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BB
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89,15
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Indeks	Domain SPBE	13,24
		Indeks Smart City	Indeks	Dimensi Smart City	68
		Indeks Keamanan Informasi	%	Jumlah sistem elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan : dengan jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun x 100	79
		Persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	%	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi : dengan jumlah data statistik sektoral yang terkumpul x 100	82
		Persentase informasi dan komunikasi publik yang bisa diakses lewat media komunikasi	%	Jumlah informasi yang diakses publik : dengan jumlah penyebaran informasi x 100	80

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	%	Data BPS	70
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	23
		Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Perangkat daerah Jumlah capaian sasaran strategis Perangkat daerah x 100	15
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	12
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	(Investasi tahun lalu : investasi tahun ini) x 100	72
		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	Jml investor tahun n dikurangi jml investor tahun (n-1) dibagi jml investor tahun n x 100	40
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89,15
		Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	(jumlah indikator kinerja yang mencapai target : jumlah indikator kinerja seluruhnya) x 100	66,37
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1 : Jumlah wisatawan tahun n-1) x 100	2,9

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	(Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n dikurangi Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1 : Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1 kali 100	61,2
		Persentase inovasi ekonomi kreatif	%	(jumlah inovasi produk ekonomi kreatif : jumlah produk ekonomi kreatif: kajian yang dilaksanakan) x 100	87,69
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,5
		Jumlah medali yang diperoleh	Medali	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	22,6
		Persentase peningkatan pemuda berprestasi	%	{(Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n – Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n-1) : Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n-1} x 100	4
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	$TGM = (0,3 \times (FM + DM + JB)) + 0,05 \times (FAI + DAI)$	66,33
		index pembangunan literasi masyarakat	Indeks	$IPLM = \sum UPLM : AM$	2,8
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60,8

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	(jumlah indikator kinerja yang mencapai target : jumlah indikator kinerja seluruhnya) x 100	85%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,66
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Indeks	$T = (a + i + s + j) : 4$	75,4
				T = tingkat ketersediaan arsip	
				a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	
				i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	
				s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	
				j = persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Indeks	$T = (m + b + g + a + c + i) : 6$	22,4
				T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	
				m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	
				b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	
				g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten: kota dengan NSPK	

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
				a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	
22	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	Indeks tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang dilaksanakan	Indeks	nilai rata-rata Indeks semua pelayanan yang dilaksanakan	85
		Kontribusi sektor Perikanan dan Peternakan terhadap PDRB ADHK	%	data dari bps (dirilis setiap bulan februari)	21,95
		Persentase Capaian Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	%	Capaian produksi perikanan tangkap ditambah perikanan budidaya pada tahun n : target produksi perikanan tangkap ditambah target produksi perikanan budidaya x 100	97
		Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan	%	Capaian tingkat konsumsi makan ikan pada tahun n : target tingkat konsumsi makan ikan x 100	98
		Persentase Produksi Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu)	%	Capaian produksi tahun n : target produksi tahun n x 100	
		Persentase Hewan / Ternak yang Terobati	%	Capaian hewan ternak terobati pada tahun berjalan : target capaian hewan ternak terobati x 100	90
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100
23	Dinas Pangan dan Pertanian	Persentase penguatan cadangan pangan daerah	%	jumlah cadangan pangan tahun n dikurangi tahun n-1 : tahun n-1 x 100	0,025

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Ton)			
		a. Beras	Ton	Produksi Gabah Kering Panen dikurangi Angka susut (benih, pakan, tercecer, susut) dikonversidengan rendemenberas 62,74	121.734,00
		b. Jagung	Ton	Produksi Jagung dikurangi Angkasusut atau xkandengan angka konversi jaguang89	72.573,00
		Cadangan Pangan Daerah (Ton)	Ton	Jumlah cadanganpangan kabupaten : standar cadanganpangan kabupaten x 100	10,7
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	%	jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian : Jumlah PDRB x 100	24,77
		Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	Jumlah produksi pertanian (Pangan, Horti daPerkebunan) per hektar per tahun : luas panen *100	0,0108
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,3
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,3
24	Sekretariat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP B	%	Jumlah PD yang mendapat nilai B : jumlah PD yang ada x 100	67,1
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85
25	Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atasPelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Hasil Survey: Kuesioner Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	2,99
		Indeks Kepuasan Anggota DPRD atasPelayanan SekretariatDPRD	Indeks	Hasil Survey: Kuesioner Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	79

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65
26	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Indeks Perencanaan	Indeks	60 Capaian sasaran pemda+20 sasaran perangkat daerah+20capaian program daerah	79
		Persentase sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	%	(Jumlah sasaran pembangunan daerah yang mencapai target : total sasaran pembangunan daerah) x 100	91
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	Jumlah program dalam RKPD th berkenaan : jumlah program APBD th berkenaan x 100	100
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	ISP+rata-rata ISI	63
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	(Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan : Jumlah total hasil kelitbangan)x 100	100
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	(Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah : jumlah total perangkat daerah) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,8
27	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	status	STATUS	WTP
		Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	%	(Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP : jumlah total OPD) x 100	100
		Persentase peningkatan pendapatan daerah	%	[(Realisasi Pendapatan Daerah tahun n)-(Realisasi Pendapatan Daerah Tahun n-1)]: (Realisasi Pendapatan Daerah Tahun n-1)*100	00.05

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase Peningkatan PAD	%	$[(\text{Realisasi PAD tahun } n) - (\text{Realisasi PAD Tahun } n-1)] : (\text{Realisasi PAD Tahun } n-1) \times 100$	1,36
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64,5
28	Badan Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	Skor	(Jumlah Skor x Bobot dalam setiap aspek)	225
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Skor	$(\text{Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter} : \text{Total Parameter Yang Terisi}) \times (1 : \text{jumlah parameter}) \times \text{Nilai Dasar } 25$	87
		Persentase ASN dengan nilai kinerja kriteria "baik"	%	$(\text{Jumlah ASN Kab Batang yang memiliki Kinerja "baik"} : \text{Jumlah ASN Kab. Batang}) \times 100$	100
		Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas	%	$(\text{Jumlah realisasi ASN yg dilatih} : \text{Jumlah Pendaftar Pelatihan}) \times 100$	80
29	Inspektorat	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	$\text{Jumlah laporan hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti} : \text{jumlah laporan hasil pengawasan} \times 100$	85
		Persentase pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	%	$\text{pencapaian nilai kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya} \times 100$	85
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	$\text{jumlah laporan pengaduan masyarakat yg terselesaikan} : \text{jumlah laporan pengaduan masyarakat tahun berjalan} \times 100$	85
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
30	Kecamatan Bandar	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	41
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,15
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	41
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60
31	Kecamatan Banyuputih	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	65
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89
		Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x100	45,5
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60
32	Kecamatan Batang	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	60
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiaptahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x100	60
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguanTrantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60
33	Kecamatan Bawang	Skor Evaluasi UnitPelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiridi Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri: JumlahDesa) x 100	75
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguanTrantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70
34	Kecamatan Blado	Skor Evaluasi UnitPelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	38,8
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
		Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiaptahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Mandiri: JumlahDesa) x 100	38,8
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguanTrantibum seluruhnya) x 100	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80
35	Kecamatan Gringsing	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa)x100	66,6
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67
36	Kecamatan Kandeman	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,50 (B)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	70
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa)x100	90
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85
37	Kecamatan Limpung	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	70,59
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa)x100	47,06
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguanTrantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68
38	Kecamatan Pecalungan	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa)x100	70
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguanTrantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75
39	Kecamatan Reban	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Persentase Status Desa Maju dan Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri: Jumlah Desa) x 100	47,36
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Majan Mandiri tiap tahun	%	Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri: Jumlah Desa) x 100	36,84
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguanTrantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75
40	Kecamatan Subah	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiridi Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	35,29
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiaptahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	35,29
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguanTrantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70
41	Kecamatan Tersono	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri diKecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,5
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa)x100	75

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguanTrantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60
42	Kecamatan Tulis	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,80 (SB)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	70
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiaptahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa)x100	70
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguanTrantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80
43	Kecamatan Warungasem	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiaptahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa)x100	85
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguanTrantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
44	Kecamatan Wonotunggal	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	33,3
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri: Jumlah Desa) x 100	46,6
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang, 2025

Selanjutnya, seluruh indikator kinerja serta program prioritas pembangunan di Kabupaten Batang Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
 Penetapan Indikator Kinerja dan Program Prioritas Kabupaten Batang Tahun 2025

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
1.01	Pendidikan				
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan				
		Angka Partisipasi Sekolah (SPM)	%	Jumlah peserta didik usia 5-15 tahun : jumlah penduduk usia 5-15 tahun x 100	100
		Persentase capaian SPM Pendidikan (SPM)	%	Jumlah jenis layanan SPM Bidang Pendidikan yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Bidang Pendidikanx 100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum				
		Persentase satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	Jumlah satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal : jumlah seluruh satuan pendidikan x 100	95
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
		Persentase guru berkualifikasi S1/D4	%	Jumlah guru Berkualifikasi S1/D4 : jumlah guru seluruhnya x 100	100
2.22	Kebudayaan				
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan				
		Persentas festival seni yang dilaksanakan	%	jumlah festival seni yang diselenggarakan pada tahun berjalan (n) : jumlah festival seni yang ditargetkan x 100	100
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional				
		Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	%	jumlah komunitas / sanggar kesenian yang difasilitasi : jumlah komunitas / sanggar seni yang terdaftar x 100	75
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				
		Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	%	Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan : dengan jumlah seluruh benda cagar budaya x 100	85
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	98
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	94
		cakupan layanan operasional kantor	%	Cakupan layanan operasional kantor	92
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	16

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	95
1.02	Kesehatan				
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
		Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	%	Jumlah capaian masing masing indikator SPM : Jumlah indikator SPM x 100	100
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
		Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman				
		Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	%	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang berijin : jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang ada x 100	84
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
		Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	rasio	Jumlah posyandu mandiri : jumlah balita x 100	12,74
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	98
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	94
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	99
1.02	Kesehatan				
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
		Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan (indikator SPM)	%	Jumlah jenis layanan SPM Bidang Kesehatan yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Bidang Kesehatan x 100	100
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
		Persentase tenaga kesehatan yang berijin (indikator SPM)	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	99,7
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	45
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
1.02	Kesehatan				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
		Persentase tenaga kesehatan yang berijin (indikator SPM)	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar / Jumlah gedung, sarana dan prasarana yang diadakan / jumlah gedung yang dibangun	%	jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standar yang seharusnya dimiliki x 100	88
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase capaian kinerja program DPUPR	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	93,44
		persentase capaian kinerja anggaran program/kegiatan DPUPR	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	94,1
		Persentase ASN DPUPR yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	cakupan layanan operasional kantor	15,3
		cakupan layanan operasional kantor	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	83,98
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan		Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha),	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		irigasi	%	direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting : luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota x 100	4,28
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				
		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak (indikator SPM)	%	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x 100	100
		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman (indikator SPM)	%	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x 100	100
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional				
		Persentase TPA dalam kondisi baik	%	Jumlah TPA dalam kondisi baik : Jumlah TPA seluruhnya x100	100
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				
		Persentase jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (indikator SPM)	%	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x100	100
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase				
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air	%	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) : Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km) x 100	71,43
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman				
		Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	%	Panjang jalan dan drainase lingkungan : Panjang jalan dan drainase lingkungan seluruhnya x100	59,04
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung				
		Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan	%	Jumlah Gedung negara yang sesuai dengan peruntukkan : Jumlah Bangunan Gedung negara yang menjadi kewenangan Pemkab x 100	100
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik : Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut x 100	65,5
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi				
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	Jumlah tenaga kerja konstruksi operator dan teknis/analisis : Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota x 100	12,5
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				
		Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang	%	Luas wilayah RRTR yang ditetapkan : luas wilayah RRTR yang ditargetkan x 100	75,47
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	68
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100
		cakupan layanan operasional kantor	%	Cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	25
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah (indikator SPM)	%	Jumlah rumah korban bencana yg ditangani : Jumlah Rumah Korban Bencana seluruhnya x 100	100
1.04.03	Program Kawasan Permukiman				
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	%	Jumlah Luas kawasan kumuh yang tertangani : Jumlah luas kawasan kumuh seluruhnya x 100	63,5
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				
		Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	Jumlah Perumahan yang sdh dilengkapi PSU : Jumlah Perumahan se Kab. Batang x 100	84
2.10	Pertanahan				
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan				
		Persentase permohonan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan yang tertangani	%	jumlah permohonan yang terfasilitasi : jumlah permohonan tanah seluruhnya x 100	85
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase capaian kinerja program SATPOL PP	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	97
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	97
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	98,5
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	84

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	93,5
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum				
		Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	Jumlah laporan gangguan trantib yang tertangani : jumlah seluruh laporan gangguan trantib*100	100
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran				
		Persentase waktu tanggap "respon time" (indikator SPM)	%	Jumlah penanganan kebakaran sesuai respon time : jumlah kejadian kebakaran*100	100
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program BPBD	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	98
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	97
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/ fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	80
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana				
		Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani (indikator SPM)	%	Jumlah korban bencana yang ditangani : Jumlah Korban Bencana X 100	100
		Persentase Jumlah Desa/Kel yang mendapat Pelayanan Penanggulangan Bencana (Indikator SPM)	%	(Jml desa Terkena bencana mendapat penanggulangan bencana :Jml. desa terkena bencana) x 100	100
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	98
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	96,25
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	84
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	80
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	86,25
1.06	Sosial				
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial				
		Cakupan		Jumlah Potensi sumber	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten (indikator SPM)	%	Kesejahteraan Sosial ditingkatkan kemampuannya : Jumlah PSKS di Daerah Kabupaten X 100	100
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan				
		Persentase Warga Negara Migran korban tidak kekerasan yang berhasil dipulangkan	%	jumlah warga negara migran yang berhasil dipulangkan : Jumlah warga migran korban kekerasan x 100	45
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial				
		Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : Jumlah PMKS di Kabupaten Batang x 100	100
		(indikator SPM)			
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial				
		Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial (SPM)	%	Jumlah jenis layanan SPM Urusan sosial yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Urusan sosial x 100	100
1.06.06	Program Penanganan Bencana				
		Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)	%	jumlah korban bencana alam dan sosial terpenuhi kebutuhan dasarnya : Jumlah korban bencana alam dan sosial x 100	100
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				
		Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik : Jumlah Taman Makam Pahlawan x 100	100
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	98,8

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	95
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	98,5
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	65
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	98,5
2.07	Tenaga Kerja				
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja				
		Persentase Kegiatan yang mengacu RTK	%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang Diaksanakan yang mengacu ke RTKD : Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten / Kota x 100	100
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja				
		Rasio penduduk yang bekerja	%	Jumlah Penduduk 15 th ke atas : Angkatan Kerja x 100	74
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja				
		Persentase Pencari pekerja yang mendapat pekerjaan	%	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan : dengan jumlah pencari kerja terdaftar x 100	41
2.07.05	Program Hubungan Industrial				
		Penurunan Jumlah Perselisihan HI	rasio	Jumlah sengketa pengusaha pekerja : jumlah perusahaan x 100	14,4
3.32	Transmigrasi				
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan transmigrasi				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase transmigran yang berhasil ditempatkan	%	Jumlah Transmigran yang ditempatkan : Jumlah Transmigran yang mendaftar x 100	100
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	95
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	97,9
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	96,8
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	83,33
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan				
		Persentase ARG pada belanja pelaksanaan program dan kegiatan di APBD	%	Jml ARG pada Anggaran Program Kegiatan APBD : jml seluruh anggaran pada Program Kegiatan x 100	3,4
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan				
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Index	Jml Perempuan Yg Mengalami Kekerasan : Jml Penduduk Perempuan	100
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga				
		Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan	%	jml lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan/jml lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga x 100	21,43

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		kelembagaan			
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak				
		cakupan data pilah gender dan anak	%	jumlah jenis data yang tersedi : jumlah jenis data yang dibutuhkan x100	100
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)				
		cakupan kecamatan layak anak	%	Jml Kec yg sudah layak anak : jml kecamatan x 100	86,67
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak				
		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	Jml aduan kekerasan thd perempuan yg trtangani : Jml kekerasan thd perempuan yg terlaporkan x 100	100
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk				
		Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana	%	Jml jenis data kependudukan bid KB : Target jml jenis data kependudukan bid. KB x 100	100
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)				
		Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	Jml peserta KB Aktif Modern / Jml Pasangan Usia Subur x 100%	74,34
		Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	Jml PUS yg ingin ber - KB tetapi tidak terlayani/Jml Pasangan Usia Subur x 100%	12,51
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				
		Cakupan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	%	Jumlah keluarga yang didampingi kelompok Tribina : Jumlah Keluarga x 100	78,71

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL)			
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	86,24
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	88,23
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	97,9
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	83,33
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	94,6
2.09	Pangan				
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan				
		Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	%	Jumlah kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan : jumlah seluruh kegiatan ketahanan pangan x 100	12,5
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				
		Skor Pola Pangan Harapan	%	Hasil kali konsumsi energi dengan bobot dibandingkan dengan Skor Maksimal Kelompok Pangan	89,7
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan				
		Rasio Desa mandiri Pangan	%	Desa yang mendapatkan fasilitas Desa Mandiri Pangan : jumlah desa di Kab. Batang x 100	17
2.09.05	Program Pengawasan				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
	Keamanan Pangan				
		Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	%	Jumlah daerah pengawasan keamanan pangan : jumlah daerah aman pangan x100	100
3.27	Pertanian				
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian				
		Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun	%	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun : luas panen X 100	0,0108
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
		Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	%	realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian : rencana kegiatan pembangunan prasarana pertanian X 100	100
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian				
		Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	%	(jumlah daerah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian : jumlah seluruh daerah yang terkena bencana pertanian)x100	100
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian				
		Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian	%	jumlah Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian yang mengikuti pelatihan : jumlah Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha di Kabupaten x 100	100
		Persentase validitas data Pertanian	%	jumlah kesesuaian data yang tervalidasi : jumlah kesesuaian data yang ada x 100	100
		Persentase kenaikan pelaksanaan penyelenggaraan Penyuluhan	%	jumlah data laporan yang tersedia : jumlah BPP x 100	100
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	93
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	92,5

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	93
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	89
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	93
2.11	Lingkungan Hidup				
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				
		Tingkat ketersediaan Dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah	%	jumlah dokumen yang disusun jumlah dokumen yang dibutuhkan x 100	100
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
		Indeks Kualitas Air	indeks	Hasil perhitungan indeks kualitas air (Permendagri 86/2017)	50
		Indeks Kualitas Udara	indeks	Hasil perhitungan indeks kualitas udara (Permendagri 86/2017)	80
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)				
		Persentase RTH dalam kondisi baik	%	Jumlah RTH yang dikelola dalam kondisi baik : jumlah RTH eksisting x 100	70
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)				
		Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	%	Jumlah persetujuan yang dikeluarkan : jumlah permohonan x 100	100
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
	Hidup (PPLH)				
		Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH : izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten yang ditangani : Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten x 100	65
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat				
		Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	%	Jumlah komunitas pduli LH yang di edukasi : Jumlah komunitas LH yang direncanakan edukasix 100	100
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				
		PersentaseDunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	%	Jumlah Dunia Pendidikan yang memenuhi nilai standar : jumlah sekolah yang mendaftar x 100	100
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan				
		Persentase penanganan sampah	%	Jumlah sampah yang tertangani : jumlah timbulan sampah x 100	80
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah		(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	94,05
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	95,04
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	13

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		yang dibutuhkan			
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	94,05
2.12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk				
		Persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	%	[(Jumlah penduduk memiliki KTP el : Jumlah penduduk usia 17 th ke atas) + (Jumlah penduduk memiliki KIA : jumlah penduduk di bawah usia 17 th) : 2] x 100	94,5
2.12.03	Program Pencatatan Sipil				
		Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir	%	[(Jumlah kepemilikan akta nikah : jumlah pemohon) + (jumlah akta usia bayi 0-5 th : penduduk usia 0-5 th) : 2] x 100	97,6
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
		Persentase penyajian data kependudukan yang valid	%	(Jumlah data kependudukan yang valid: jumlah seluruh data kependudukan) x 100	95,6
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	95
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	96
		cakupan layanan operasional kantor	Bulan	cakupan layanan operasional kantor	12
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	25
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian	95

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		dan keuangan yang diselesaikan) x 100	
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
2.13.02	Program Penataan Desa				
		Persentase budaya desa yang dilestarikan	%	jumlah adat dan budaya desa yang dilestarikan : jumlah adat budaya desa x 100	60
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa				
		Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	desa	jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya : total desa di Kabupaten Batang x 100	56,49
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat				
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa	%	jumlah LKD yang aktif : jumlah LKD keseluruhan x 100	75
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	70
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
2.15	Perhubungan				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
		Persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat	%	Jumlah kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang dilaksanakan : jumlah kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang ditetapkan x 100	87
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase capaian kinerja program Diskominfo	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	-	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	100
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
2.16	Komunikasi dan Informatika				
2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik				
		Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	Jumlah informasi yang diakses publik : jumlah penyebaran informasi x 100	72
2.16.03	Program Aplikasi Informatika				
		Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	%	Jumlah layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi : jumlah layanan x 100	73
2.20	Statistik				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
		Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi : Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul x100	100
2.21	Persandian				
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				
		Persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya	%	Jumlah Sistem Elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan : jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun x100	100
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase capaian kinerja program Disperindagkop dan UKM	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	92
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	92
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	96,81
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	5,7
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	96,81
2.17	Koperasi dan UKM				
2.17.04	Program Penilaian dan Kesehatan KSP/USP Koperasi				
		Persentase koperasi aktif	%	(jumlah koperasi aktif : jumlah koperasi keseluruhan) x 100	68
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase peserta pelatihan dengan predikat baik	%	(jumlah peserta pelatihan/diklat yang lulus : jumlah peserta pelatihan/diklat) x 100	100
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				
		persentase peserta diklat dengan predikat baik	%	(jumlah peserta pelatihan/diklat yang lulus : jumlah peserta pelatihan/diklat) x 100	100
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah UMKM				
		Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru	%	(jumlah UMKM Baru tahun n - jumlah UMKM tahun n-1) : jumlah UMKM tahun n-1 } x 00	12
2.17.08	Program Pengembangan UMKM				
		Persentase produk UMKM yang terstandarisasi	%	Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N - Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N- 1) :Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N- 1) X 100	20
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				
		Presentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa pada tahun N : Jumlah Koperasi pada tahun n x100	50,53
3.30	Perdagangan				
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan				
		Persentase Verifikasi Teknis	%	Jumlah verifikasi teknis : Jumlah yang pengajuan x100	100
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	jumlah pasar rakyat dan Shelter PKL yang direvitalisasi/renovasi : jumlah pasar rakyat dan Shelter PKL keseluruhan x100	36,36
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				
		Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga	%	barang pokok yang stabil harganya : seluruh barang kebutuhan pokok x 100	75

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor				
		nilai ekspor perdagangan	USD	nilai ekspor perdagangan - nilai impor pada tahun n kabupaten kota	60.215.421
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				
		Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	Jumlah UTTP bertera /tera ulang : Potensi UTTP x 100	75
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri				
		Persentase Pelaksanaan Pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang	%	Jumlah Pelaksanaan pameran : jumlah pameran yang direncanakan x 100	100
3.31	Perindustrian				
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri				
		Persentase peningkatan jumlah pelaku IKM	%	jumlah pelaku IKM tahun n- jumlah pelaku IKM tahun n-1) : jumlah pelaku IKM tahun n-1 x 100	0,0079
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota				
		Persentase peningkatan jumlah perijinan berusaha sektor industri	%	jumlah izin usaha tahun n- jumlah izin usaha tahun n-1) : jumlah izin usaha tahun n-1 x 100	86
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional				
		persentase jumlah Industri dalam SIINas	%	jumlah Industri dalam SIINas tahun n- jumlah Industri dalam SIINas tahun n-1) : jumlah Industri dalam SIINas tahun n-1 x 100	86
17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	7
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
2.18	Penanaman Modal				
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				
		Persentase peningkatan jumlah investor	%	Jumlah investor tahun n dikurangi Jumlah investor tahun (n-1) : jumlah investor tahun n x 100	60
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal				
		Persentase promosi di kabupaten Batang	%	Jumlah promosi yang direncanakan : jumlah promosi yang dilaksanakan x 100	100
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal				
		Persentase ijin yang diterbitkan	%	Jumlah pemohon ijin usaha : jumlah ijin yang diterbitkan x 100	100
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
		Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal	%	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM : jumlah perusahaan x100	8
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal				
		Persentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia	%	Jumlah pemberian pelayanan data : jumlah pemohon data x 100	45

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	23
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
3.26	Pariwisata				
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
		Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	(Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n dikurangi Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1 : Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n- 1 x 100	19
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata				
		Persentase peningkatan wisatawan	%	Jumlah wisatawan tahun n dikurangi Jumlah wisatawan tahun n-1 : Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100	22
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				
		Persentase jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	%	jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki HAKI : jumlah produk ekonomi kreatif yang terdaftar X 100	25
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	%	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat : Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif X 100	40
2.19	Kepemudaan dan Olahraga				
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
		Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	jumlah organisasi kepemudaan yang dibina : jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar x 100	39
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				
		capaian medali kejuaraan	medali	Jumlah total medali yang didapat selama 1 Tahun	45
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				
		Penghargaan yang diterima	%	Jumlah penghargaan yang diterima : jumlah kegiatan yang diikuti X 100	10
19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	87
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	93,79
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	97,72
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	60
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		perundang-undangan			
2.23	Perpustakaan				
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan				
		Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	%	(Jumlah peningkatan pengunjung : Jumlah pengunjung tahun sebelumnya) x 100	0,16
2.24	Kearsipan				
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip				
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (IKK outcome)	indeks	T = (a + i + s + j)/4 T = tingkat ketersediaan arsip, a = tase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, i = tase arsip inaktiv yang telah dibuatkan daftar arsip, s = tase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik, j = tase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	75,5
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip				
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK outcome)	indeks	T=(m + b + g + a + c + i)/6 m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPKg = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK, a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK, c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK, i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	22,6
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	98
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	94,5
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	97,3
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	20
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
3.25	Kelautan dan Perikanan				
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				
		Persentase Capaian Produksi Perikanan Tangkap	%	(Realisasi Capaian Produksi Perikanan Tangkap : Target Produksi Perikanan Tangkap) x 100	97
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
		Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya	%	(Realisasi Produksi Perikanan Budidaya : Target Produksi Perikanan Budidaya) x 100	94
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				
		Capaian Bina Kelompok Masyarakat Pengawas	%	(Realisasi Jumlah Pokmaswas yang Diberdayakan : Target) x 100	100
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				
		Persentase Capaian Tingkat konsumsi makan ikan	%	(Realisasi Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan : Target Tingkat Konsumsi Makan Ikan) x 100	98
3.27	Pertanian				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatxn Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				
		Capaian Jumlah Hewan yang Terobati	%	(Realisasi Jumlah Hewan yang Terobati di Puskesmas : Target Hewan yang Terobati di Puskesmas) x 100	100
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian				
		Persentase Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan	%	(Realisasi Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan: Target) x 100	100
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian				
		Prosentae Capaian Populasi Ternak dan Produksi Hasil Peternakan	%	(Realisasi Populasi Ternak dan Produksi Hasil Peternakan : Target) x 100	85
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
		Capaian Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	(Realisasi Peningkatan Prasarana Pertanian yang Dilakukan Pembangunan, Perawatan dan Rehabilitasi : Target) x 100	100
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian				
		Persentase Capaian Jumlah Hewan yang Terobati	%	(Realisasi Jumlah Hewan Ternak yang Terobati : Target Hewan Ternak yang Terobati) x 100	100
21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	85
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah: target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	97

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	75
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
5.01	Perencanaan				
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah				
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	%	jumlah dokumen perencanaan yang tersedia tepat waktu : jumlah dokumen yang dihasilkan x 100	100
		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan	%	jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang dievaluasi : jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang dihasilkan x 100	100
		Persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah	%	jumlah elemen data/informasi yang tersedia : jumlah elemen data/informasi yang dibutuhkan sebagai bahan analisis x100	100
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
		Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang PSDA yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PSDA yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PSDA) x 100	91
		Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PPM yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PPM) x 100	91
		Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang IPW yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. IPW yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. IPW) x 100	91

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
5.05	Penelitian dan Pengembangan				
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				
		Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah rekomendasi utama kegiatan kelitbangan yg mjd bahan masukan penyusunan renja : Kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan) x100	60
22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase capaian kinerja program BKD	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti BinteK, Sosialisasi dan workshop puma tugas	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	100
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
5.03	Kepegawaian				
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah				
		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu	%	(Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu : Jumlah semua layanan administrasi kepegawaian yang ada) x 100	100
5.04	Pendidikan dan Pelatihan				
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				
		Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup sub koordinator diklat yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup sub koordinator diklat)x100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	97
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	96
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	96
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
5.02	Keuangan				
5.02.03	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
		Penyampaian Raperda APBD tepat waktu	status	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu
		Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban tepat waktu	status	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu
		Persentase Realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja	%	realisasi belanja : anggaran belanja x 100	90
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				
		Persentase tersusunnya data aset Pemda menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemanfaatan dan kondisinya	%	Dokumen KIB per SKPD se Kabupaten Batang	100
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	%	$[(\text{Realisasi tahun } n) - (\text{Realisasi tahun } n-1)] : \text{Realisasi tahun } n-1 \times 100$	1,36
24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	$(\text{capaian kinerja program perangkat daerah} : \text{target kinerja program perangkat daerah}) \times 100$	90
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	$(\text{capaian kinerja anggaran program perangkat daerah} : \text{target kinerja anggaran program perangkat daerah}) \times 100$	90
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	85
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	$(\text{Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan} : \text{jumlah ASN di perangkat daerah}) \times 100$	90
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	$(\text{Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu} : \text{jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan}) \times 100$	90
4.01	Sekretariat Daerah				
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
		Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu	%	$\text{Jumlah tersusunnya LPPD tepat waktu} : \text{jumlah keseluruhan LPPD perangkat daerah} \times 100$	100
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi	%	$\text{Jumlah penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi} : \text{jumlah keseluruhan administrasi tata pemerintahan} \times 100$	100
		Presentase kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang difasilitasi	%	$\text{Jml kegiatan yang terlaksana} : \text{jml kegiatan yg direncanakan} \times 100$	100
		Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi		$(\text{realisasi persentase penyusunan produk hukum daerah yang berhasil difasilitasi} + \text{persentase perkara hukum yang terselesaikan} + \text{persentase penyediaan informasi produk}) : (\text{persentase target})$	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
			%	Penyusunan produk hukum daerah yang berhasil difasilitasi + persentase perkara hukum yang terselesaikan + persentase penyediaan informasi produk hukum) x 100	95
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan				
		Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal)	%	(Jumlah deviden : Jumlah Penyertaan Modal) x 100	15
		Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti : jumlah kebijakan yang dikeluarkan baik pusat atau daerah) x 100	100
		Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target	%	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan : Jumlah seluruh paket pekerjaan yang direncanakan x 100	97
		Persentase lelang melalui e-procurement	%	Jumlah Paket yang dilelang : Jumlah Total Rencana Paket Lelang x 100	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	skor	Total nilai kematangan PD : jumlah PD	36 (sedang)
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	Jumlah PD yang mendapat telah menerapkan SOP : jumlah PD x 100	100
		Persentase kegiatan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi Kepala Daerah	%	Jumlah kegiatan pimpinan yang terfasilitasi : jumlah permohonan fasilitasi kegiatan pimpinan x 100	100
		Persentase kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	%	Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional KDH dan WKDH, Fasilitas Kerumahtanggaan Setda : target x 100	90
25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Daerah			
		cakupan layanan operasional kantor	bulan	cakupan layanan operasional kantor	12
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	100
		Persentase administrasi keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%		
4.02	Sekretariat DPRD				
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				
		Persentase Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan	%	Capaian Peraturan Daerah non APBD yang terbentuk target Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan per tahun x 100 (ket: target Perda non APBD yang ditetapkan per tahun sebanyak 5 Perda)	100
		Persentase kUA/PPA dan PerdaAPBD yang ditetapkan	%	Capaian Peraturan Daerah APBD yang terbentuk : target Peraturan Daerah APBD yang ditetapkan per tahun x 100 (ket: target Perda APBD yang ditetapkan per tahun sebanyak 3 Perda, dan 2 Perbup KUA/PPA)	100
		Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana dan Kode Etik DPRD	%	Capaian kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana target kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan x 100 (target sesuai jumlah kegiatan pengawasan yang dijadwalkan per tahun)	100
		Persentase peningkatan kapasitas Anggota DPRD	%	Rata-rata capaian kinerja fasilitasi kegiatan failitasi peningkatan kapasitas DPRD	100
		Persentase penyerapan aspirasi masyarakat	%	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD per tahun	45
		Persentase fasilitasi tugas Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD	%	Jumlah kegiatan Alat Kelengkapan Dewan yang difasilitasi : jumlah kegiatan Alat Kelengkapan Dewan yang dijadwalkan x 100	100
		Persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD	%	Jumlah kegiatan admnistrasi Dewan yang difasilitasi : jumlah kegiatan administasi Dewan yang dijadwalkan x 100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	Jumlah anggota DPRD yang mendapat layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD : jumlah Anggota DPRD x 100	100
26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	10
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik				
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan				
		Persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang bagus	%	(Jumlah masyarakat yang telah mendapat Sosialisasi wasbang yang mengamalkan ideologi dan karakter bangsa yang bagus : jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi wasbang) x 100	95
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
		Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung Pemerintah	%	(Jumlah Parpol dan Lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam mendukung pemerintah : jumlah parpol dan lembaga pendidikan dibatang) x 100	100
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	%	(Jumlah Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan : Jumlah Ormas yang terdaftar resmi) x 100	100
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya				
		Persentase masyarakat yang paham tentang ketahanan Ekososbud	%	(Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan paham terhadap ketahanan Ekosbud : jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi) x 100 (Melalui Pretest dan postest)	100
8.01.06	Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				
		Persentase penurunan konflik sosial	%	(Jumlah konflik sosial tahun berkenaaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) x 100	100
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	95
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	95
		cakupan layanan operasional kantor	bulan	cakupan layanan operasional kantor	95
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	95
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	95
6.01	Pengawasan				
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase Jumlah Pemeriksaan Yang Dilakukan	%	Jumlah LHP yang diterbitkan dibandingkan jumlah obrik x 100	100
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi				
		Level SPIP	level	kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya dalam satu tahun anggaran	3
		Persentase kapabilitas APIP	%	kondisi tahun berjalan : kondisi tahun sebelumnya dalam satu tahun anggaran x 100	70
28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah: target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100
		cakupan layanan operasional kantor	bulan	cakupan layanan operasional kantor	12
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	100
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
7.01	Kecamatan				
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
		Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	(Usulan yang masuk perangkian : Jumlah Usulan Perencanaan) x 100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90
29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
		Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan Gangguan Trantibum) x 100	100
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90
30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	100
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
		Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
		Persentase desa yang melaksanakan		(Jumlah desa dengan pengelolaan	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	keuangan baik : Jumlah desa) x100	90
31	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	100
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
		Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90
32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	100
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
		Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompincam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
		Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90
34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	98

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	100
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
		Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90
35	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentas rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	100
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
		Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90
36	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	100
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
		Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompincam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90
37	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	90

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
		Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
		Persentase Desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90
38	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	99
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	80
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
		Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90
39	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	100
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
		Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompincam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90
40	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	100
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
		Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompincam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90
41	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah: target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	90
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		sesuai peraturan perundang-undangan		diselesaikan) x 100	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
		Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90
42	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	100
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
		Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang, 2025

BAB IV

PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Plafon Perubahan Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025

KODE		URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.197.144.267.655,00	1.254.701.528.406,73	57.557.260.751,73
1	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	682.894.632.847,00	711.252.717.058,00	28.358.084.211,00
1	2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	351.263.285.283,00	388.344.886.437,73	37.081.601.154,73
1	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	112.712.889.450,00	109.903.380.926,00	(2.809.508.524,00)
1	4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	23.130.808.940,00	21.084.261.884,00	(2.046.547.056,00)

1	5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	17.236.733.776,00	13.970.841.218,00	(3.265.892.558,00)
1	6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	9.905.917.359,00	10.145.440.883,00	239.523.524,00
2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	151.440.282.283,00	157.537.703.018,00	6.097.420.735,00
2	1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	7.247.664.024,00	7.603.697.001,00	356.032.977,00
2	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.924.797.051,00	4.837.241.003,00	(87.556.048,00)
2	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	1.383.940.000,00	1.487.237.100,00	103.297.100,00
2	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	30.000.000,00	19.013.225,00	(10.986.775,00)
2	5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	17.055.023.456,00	18.304.025.850,00	1.249.002.394,00
2	6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan	7.784.665.647,00	7.581.252.357,00	(203.413.290,00)

		Pencatatan Sipil			
2	7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	26.975.508.405,00	30.714.919.129,00	3.739.410.724,00
2	8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	11.608.367.000,00	13.731.627.349,00	2.123.260.349,00
2	9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	35.920.761.959,00	36.477.797.518,00	557.035.559,00
2	10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	7.906.766.965,00	7.622.241.185,00	(284.525.780,00)
2	11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	9.002.558.530,00	7.920.026.910,00	(1.082.531.620,00)
2	12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	5.631.603.400,00	4.219.398.311,00	(1.412.205.089,00)
2	13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	6.122.565.567,00	7.360.637.059,00	1.238.071.492,00
2	14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	468.137.950,00	270.627.700,00	(197.510.250,00)
2	15	Urusan Pemerintahan	100.000.000,00	57.662.750,00	(42.337.250,00)

		Bidang Persandian			
2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	3.699.000.000,00	3.654.012.000,00	(44.988.000,00)
2	17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	5.276.424.779,00	5.478.021.881,00	201.597.102,00
2	18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	302.497.550,00	198.264.690,00	(104.232.860,00)
3		Urusan Pemerintahan Pilihan	53.821.024.414,00	44.008.273.038,00	(9.812.751.376,00)
3	1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	7.725.713.575,00	8.351.881.741,00	626.168.166,00
3	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	7.054.153.905,00	6.867.296.837,00	(186.857.068,00)
3	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	29.860.118.498,00	19.683.760.899,00	(10.176.357.599,00)
3	4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	3.759.251.936,00	3.903.369.696,00	144.117.760,00
3	5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	5.313.000.000,00	5.142.715.465,00	(170.284.535,00)
3	6	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	108.786.500,00	59.248.400,00	(49.538.100,00)
4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	120.073.262.654,00	115.235.242.891,00	318.084.219.038,00

4	1	Sekretariat Daerah	61.457.274.659,00	61.313.135.930,00	(144.138.729,00)
4	2	Sekretariat Dprd	58.615.987.995,00	53.922.106.961,00	(4.693.881.034,00)
5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	438.437.702.770,00	438.157.481.692,00	(323.202.459.879,00)
5	1	Perencanaan	8.362.984.043,00	7.111.970.985,00	(1.251.013.058,00)
5	2	Keuangan	420.145.701.558,00	422.722.603.029,00	2.576.901.471,00
5	3	Kepegawaian	7.422.549.202,00	6.425.753.119,00	(996.796.083,00)
5	4	Pendidikan Dan Pelatihan	1.756.467.967,00	1.363.956.809,00	(392.511.158,00)
5	5	Penelitian Dan Pengembangan	750.000.000,00	533.197.750,00	(216.802.250,00)
6		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	16.841.983.823,00	12.922.188.283,00	(3.919.795.540,00)
6	1	Inspektorat Daerah	16.841.983.823,00	12.922.188.283,00	(3.919.795.540,00)
7		Unsur Kewilayahan	52.212.058.594,00	45.687.833.778,00	(6.524.224.816,00)
7	1	Kecamatan	52.212.058.594,00	45.687.833.778,00	(6.524.224.816,00)
8		Unsur Pemerintahan Umum	8.487.483.016,00	6.402.524.631,00	(2.084.958.385,00)
8	1		8.487.483.016,00	6.402.524.631,00	(2.084.958.385,00)

		Kesatuan Bangsa Dan Politik			
Total			2.038.458.065.209,00	2.074.652.775.737,73	36.194.710.528,73

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.197.144.267.655,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 57.557.260.751,73 atau sebesar 4,81% menjadi Rp. 1.254.701.528.406,73 dengan rincian sebagai berikut:
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 682.894.632.847,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 28.358.084.211,- atau sebesar 4,15% menjadi Rp. 711.252.717.058,-
 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 351.263.285.283,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 37.081.601.154,73 atau sebesar 10,56% menjadi Rp. 388.344.886.437,73
 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 112.712.889.450,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 2.809.508.524,- atau sebesar 2,49% menjadi Rp. 109.903.380.926,-
 4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 23.130.808.940,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 2.046.547.056,- atau sebesar 8,85% menjadi Rp. 21.084.261.884,-
 5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 17.236.733.776,- pada perubahan mengalami

- penurunan sebesar Rp. 3.265.892.558,- atau sebesar 18,95% menjadi Rp. 13.970.841.218,-
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 9.905.917.359,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 239.523.524,- atau sebesar 2,42% menjadi Rp. 10.145.440.883,-
- B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 151.440.282.283,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.097.420.735,00 atau sebesar 4,03% menjadi Rp. 157.537.703.018,- dengan rincian sebagai berikut:
1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 7.247.664.024,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 356.032.977,- atau sebesar 4,91% menjadi Rp. 7.603.697.001,-
 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 4.924.797.051,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 87.556.048,- atau sebesar 1,78% menjadi Rp. 4.837.241.003,-
 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.383.940.000,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp 103.297.100,- atau sebesar 7,46% menjadi Rp. 1.487.237.100,-
 4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 10.986.775,- atau sebesar 36,62% menjadi Rp. 19.013.225,-
 5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 17.055.023.456,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp 1.249.002.394,- atau sebesar 7,32% menjadi Rp. 18.304.025.850,-
 6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 7.784.665.647,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 203.413.290,- atau sebesar 2,61% menjadi Rp. 7.581.252.357,-

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa pada tahun 2025 direncanakan sebesar 26.975.508.405,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp 3.739.410.724,- atau sebesar 13,86% menjadi Rp. 30.714.919.129,-
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 11.608.367.000,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp 2.123.260.349,- atau sebesar 18,29% menjadi Rp. 13.731.627.349,-
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 35.920.761.959,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp 557.035.559,- atau sebesar 1,55% menjadi Rp. 36.477.797.518,-
10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika pada tahun 2025 direncanakan sebesar 7.906.766.965,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 284.525.780,- atau sebesar 3,60% menjadi Rp 7.622.241.185,-
11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 9.002.558.530,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 1.082.531.620,- atau sebesar 11,37% menjadi Rp. 7.920.026.910,-
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 5.631.603.400,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 1.412.205.089,- atau sebesar 25,08% menjadi Rp. 4.219.398.311,-
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 6.122.565.567,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp 1.238.071.492,- atau sebesar 20,22% menjadi Rp. 7.360.637.059,-
14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 468.137.950,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 197.510.250,- atau sebesar 42,19% menjadi Rp. 270.627.700,-
15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- pada perubahan

- mengalami penurunan sebesar Rp 42.337.250,- atau sebesar 42,34% menjadi Rp. 57.662.750,-
16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 3.699.000.000,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 44.988.000,- atau sebesar 1,22% menjadi Rp. 3.654.012.000,-
 17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 5.276.424.779,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp 201.597.102,- atau sebesar 3,82% menjadi Rp. 5.478.021.881,-
 18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 302.497.550,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 104.232.860 atau sebesar 34,46% menjadi Rp. 198.264.690,-
- C. Urusan Pilihan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 53.821.024.414,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 9.812.751.376,00,- atau sebesar 18,23% menjadi Rp 44.008.273.038,-
- D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 120.073.262.654,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 4.838.019.763,- atau sebesar 4,03% menjadi Rp 115.235.242.891,-
- E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 438.437.702.770,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 280.221.078,- atau sebesar 0,06% menjadi Rp. 438.157.481.692,- dengan penjabaran sebagai berikut:
1. Perencanaan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 8.362.984.043,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 1.251.013.058,- atau sebesar 14,96% menjadi Rp. 7.111.970.985,-
 2. Keuangan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 420.145.701.558,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp 2.576.901.471,- atau sebesar 0,61% menjadi Rp. 422.722.603.029,-

3. Kepegawaian pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 7.422.549.202,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 996.796.083,- atau sebesar 13,43% menjadi Rp. 6.425.753.119,-
 4. Pendidikan Dan Pelatihan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.756.467.967,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 392.511.158,- atau sebesar 22,35% menjadi Rp. 1.363.956.809,-
 5. Penelitian Dan Pengembangan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 216.802.250,- atau sebesar 28,91% menjadi Rp. 533.197.750,-
- F. Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 16.841.983.823 pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 3.919.795.540 atau sebesar 23,27% menjadi Rp. 12.922.188.283,-
- G. Unsur Pemerintahan Umum pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 8.487.483.016,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 2.084.958.385,- atau sebesar 24,57% menjadi Rp. 6.402.524.631,-
- H. Unsur Kewilayahan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 52.212.058.594,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 6.524.224.816,- atau sebesar 12,50% menjadi Rp. 45.687.833.778,-

4.2. PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Batang pada tahun 2025 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2

Perubahan Proporsi Anggaran Berdasarkan Perangkat Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	686.593.632.847,00	714.906.729.058,00	28.313.096.211,00
2	Dinas Kesehatan	351.263.285.283,00	388.344.886.437,73	37.081.601.154,73
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	112.712.889.450,00	109.903.380.926,00	(2.809.508.524,00)

4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	23.160.808.940,00	21.103.275.109,00	(2.057.533.831,00)
5	Satpol PP	11.102.231.560,00	9.807.941.888,00	(1.294.289.672,00)
6	BPBD	6.234.502.216,00	4.162.899.330,00	(2.071.602.886,00)
7	Dinas Sosial	9.905.917.359,00	10.145.440.883,00	239.523.524,00
8	Dinas Ketenagakerjaan	7.356.450.524,00	7.662.945.401,00	306.494.877,00
9	DP3AP2KB	16.533.164.051,00	18.568.868.352,00	2.035.704.301,00
10	Dinas Pangan dan Pertanian	31.244.058.498,00	21.170.997.999,00	10.073.060.499,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	17.055.023.456,00	18.304.025.850,00	1.249.002.394,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.784.665.647,00	7.581.252.357,00	(203.413.290,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	26.975.508.405,00	30.714.919.129,00	3.739.410.724,00
14	Dinas Perhubungan	35.920.761.959,00	36.477.797.518,00	557.035.559,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.474.904.915,00	7.950.531.635,00	(524.373.280,00)
16	Disperindagkop dan UKM	18.074.810.466,00	16.966.112.071,00	(1.108.698.395,00)
17	DPMPTSP	5.631.603.400,00	4.219.398.311,00	(1.412.205.089,00)
18	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	13.176.719.472,00	14.227.933.896,00	1.051.214.424,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.578.922.329,00	5.676.286.571,00	97.364.242,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.725.713.575,00	8.351.881.741,00	626.168.166,00
21	Sekretariat Daerah	61.457.274.659,00	61.313.135.930,00	(144.138.729,00)
22	Sekretariat DPRD	58.615.987.995,00	53.922.106.961,00	(4.693.881.034,00)
23	Badan Perencanaan dan Riset Daerah	9.112.984.043,00	7.645.168.735,00	(1.467.815.308,00)
24	BPKPAD	420.145.701.558,00	422.722.603.029,00	2.576.901.471,00
25	BKPSDM	9.179.017.169,00	7.789.709.928,00	(1.389.307.241,00)
26	Inspektorat Daerah	16.841.983.823,00	12.922.188.283,00	(3.919.795.540,00)
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.487.483.016,00	6.402.524.631,00	(2.084.958.385,00)
28	Kecamatan Batang	18.544.157.443,00	16.413.619.082,00	(2.130.538.361,00)

29	Kecamatan Warungasem	2.355.388.225,00	2.008.970.223,00	(346.418.002,00)
30	Kecamatan Kandeman	1.922.245.025,00	1.734.230.088,00	(188.014.937,00)
31	Kecamatan Wonotunggal	3.459.325.655,00	3.103.224.070,00	(356.101.585,00)
32	Kecamatan Bandar	2.747.116.771,00	2.464.237.397,00	(282.879.374,00)
33	Kecamatan Tulis	2.058.820.151,00	1.781.831.409,00	(276.988.742,00)
34	Kecamatan Subah	2.347.707.494,00	2.103.474.074,00	(244.233.420,00)
35	Kecamatan Blado	2.085.859.420,00	1.749.706.230,00	(336.153.190,00)
36	Kecamatan Reban	2.734.306.678,00	2.230.969.449,00	(503.337.229,00)
37	Kecamatan Bawang	2.181.354.992,00	2.101.639.102,00	(79.715.890,00)
38	Kecamatan Pecalungan	2.643.067.355,00	2.324.593.119,00	(318.474.236,00)
39	Kecamatan Limpung	2.262.084.245,00	1.908.321.993,00	(353.762.252,00)
40	Kecamatan Banyuputih	2.374.752.283,00	2.090.966.875,00	(283.785.408,00)
41	Kecamatan Gringsing	1.984.811.734,00	1.716.251.291,00	(268.560.443,00)
42	Kecamatan Tersono	2.511.061.123,00	1.955.799.376,00	(555.261.747,00)
	Jumlah	2.038.458.065.209,00	2.074.652.775.737,73	36.194.710.528,73

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Plafon Perubahan anggaran sementara berdasarkan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 686.593.632.847,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 28.313.096.211,- atau sebesar 4,12% menjadi Rp. 714.906.729.058,-
2. Dinas Kesehatan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 351.263.285.283,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 37.081.601.154,73,- atau sebesar 10,56% menjadi Rp. 388.344.886.437.73
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 112.712.889.450,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 2.809.508.524,- atau sebesar 2,49% menjadi Rp. 109.903.380.926,-

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 23.160.808.940,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 2.057.533.831,- atau sebesar 8,88% menjadi Rp. 21.103.275.109,-
5. Satpol PP pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 11.102.231.560 pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 1.294.289.672,- atau sebesar 11,96% menjadi Rp. 9.807.941.888,-
6. BPBD pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 6.234.502.216,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 2.071.602.886,- atau sebesar 33,23% menjadi Rp. 4.162.899.330,-
7. Dinas Sosial pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 9.905.917.359,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 239.523.524,- atau sebesar 2,42% menjadi Rp. 10.145.440.883,-
8. Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 7.356.450.524,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 306.494.877,- atau sebesar 4,17% menjadi Rp. 7.662.945.401,-
9. DP3AP2KB pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 16.533.164.051,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.035.704.301,- atau sebesar 12,31% menjadi Rp. 18.568.868.352,-
10. Dinas Pangan dan Pertanian pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 31.244.058.498,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 10.073.060.499,- atau sebesar 32,24% menjadi Rp. 21.170.997.999,-
11. Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 17.055.023.456,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.249.002.394,- atau sebesar 7,32% menjadi Rp. 18.304.025.850,-
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 7.784.665.647,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 203.413.290,- atau sebesar 2,61% menjadi Rp. 7.581.252.357,-
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 26.975.508.405,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.739.410.724,- atau sebesar 13,86% menjadi Rp. 30.714.919.129,-

14. Dinas Perhubungan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 35.920.761.959,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 557.035.559,- atau sebesar 1,55% menjadi Rp. 36.477.797.518,-
15. Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 8.474.904.915,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 524.373.280,- atau sebesar 6,19% menjadi Rp. 7.950.531.635,-
16. Disperindagkop dan UKM pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 18.074.810.466,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 1.108.698.395,- atau sebesar 6,13% menjadi Rp. 16.966.112.071,-
17. DPMPSTSP pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 5.631.603.400,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. -1.412.205.089,- atau sebesar 25,08% menjadi Rp. 4.219.398.311,-
18. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 13.176.719.472,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.051.214.424,- atau sebesar 7,98% menjadi Rp. 14.227.933.896,-
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 5.578.922.329,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 97.364.242,- atau sebesar 1,75% menjadi Rp. 5.676.286.571,-
20. Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 7.725.713.575,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 626.168.166,- atau sebesar 8,10% menjadi Rp. 8.351.881.741,-
21. Sekretariat Daerah pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 61.457.274.659,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 144.138.729,- atau sebesar 0,23% menjadi Rp. 61.313.135.930,-
22. Sekretariat DPRD pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 58.615.987.995,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 4.693.881.034,- atau sebesar 8,01% menjadi Rp. 53.922.106.961,-
23. Badan Perencanaan dan Riset Daerah pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 9.112.984.043,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 1.467.815.308,- atau sebesar 16,11% menjadi Rp. 7.645.168.735,-

24. BPKPAD pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 420.145.701.558,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.576.901.471,- atau sebesar 0,61% menjadi Rp. 422.722.603.029,-.
25. BKPSDM pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 9.179.017.169,- pada perubahan mengalami tidak mengalami penurunan sebesar Rp. 1.389.307.241,- atau sebesar 15,14% menjadi Rp. 7.789.709.928,-
26. Inspektorat Daerah pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 16.841.983.823,- pada perubahan mengalami tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp. 3.919.795.540,- atau sebesar 23,27% menjadi Rp. 12.922.188.283,-
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 8.487.483.016,- pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.084.958.385,- atau sebesar 24,57% menjadi Rp. 6.402.524.631,-
28. Kecamatan Batang pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 18.544.157.443,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 2.130.538.361,- atau sebesar 11,49% menjadi Rp. 16.413.619.082,-
29. Kecamatan Warungasem pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.355.388.225,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 346.418.002,- atau sebesar 14,71% menjadi Rp. 2.008.970.223,-
30. Kecamatan Kandeman pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.922.245.025,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 188.014.937,- atau sebesar 9,78% menjadi Rp. 1.734.230.088,-
31. Kecamatan Wonotunggal pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 3.459.325.655,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 356.101.585,- atau sebesar 10,29% menjadi 3.103.224.070,-
32. Kecamatan Bandar pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.747.116.771,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 282.879.374,- atau sebesar 10,30% menjadi Rp. 2.464.237.397,-
33. Kecamatan Tulis pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.058.820.151,- pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 276.988.742,- atau sebesar 13,45% menjadi Rp. 1.781.831.409,-
34. Kecamatan Subah pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.347.707.494,- pada perubahan mengalami tidak mengalami

- perubahan tetap sebesar Rp. 244.233.420,- atau sebesar 10,40% menjadi Rp. 2.103.474.074,-
35. Kecamatan Blado pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.085.859.420,- pada perubahan mengalami tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp. 336.153.190,- atau sebesar 16,12% menjadi Rp. 1.749.706.230,-
36. Kecamatan Reban pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.734.306.678,- pada perubahan mengalami tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp. 503.337.229,- atau sebesar 18,41% menjadi Rp. 2.230.969.449,-
37. Kecamatan Bawang pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.181.354.992,- pada perubahan mengalami tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp. 79.715.890,- atau sebesar 3,65% menjadi Rp. 2.101.639.102,-
38. Kecamatan Pecalungan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.643.067.355,- pada perubahan mengalami tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp. 318.474.236,- atau sebesar 12,05% menjadi Rp. 2.324.593.119,-
39. Kecamatan Limpung pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.262.084.245,- pada perubahan mengalami tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp. 353.762.252,- atau sebesar 15,64% menjadi Rp. 1.908.321.993,-
40. Kecamatan Banyuputih pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.374.752.283,- pada perubahan mengalami tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp. 283.785.408,- atau sebesar 11,95% menjadi Rp. 2.090.966.875,-
41. Kecamatan Gringsing pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.984.811.734,- pada perubahan mengalami tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp. 268.560.443,- atau sebesar 13,53% menjadi Rp. 1.716.251.291,-
42. Kecamatan Tersono pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.511.061.123,- pada perubahan mengalami tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp. 555.261.747,- atau sebesar 22,11% menjadi Rp. 1.955.799.376,-

4.3. PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM PRIORITAS

Pada bagian ini merupakan gabungan dari rincian plafon anggaran sementara untuk program yang diperoleh oleh setiap unit atau satuan kerja (Perangkat Daerah) sesuai dengan urusan yang dilaksanakan di Kabupaten Batang. Kemudian, akan disusun menjadi sebuah tabel atau matriks gabungan yang mencantumkan semua urusan dan semua Perangkat Daerah dalam satu kesatuan tabel yang dicantumkan pada **Lampiran Matriks Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Kegiatan Sub.Kegiatan Kabupaten Batang 2025, yang selengkapnya akan disajikan dalam lampiran laporan ini.**

Program dan kegiatan prioritas daerah adalah program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Rencana program dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 6 (enam) fungsi penunjang urusan pemerintahan.

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan pendidikan PAUD, dan Pengelolaan pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang didukung dengan pembangunan atau Rehabilitasi sedang/berat unit sekolah baru, ruang kelas, ruang guru, serta fasilitas sekolah lainnya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator angka partisipasi sekolah dan persentase capaian SPM Pendidikan.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar melalui penyusunan kompetensi dasar dan silabus muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal melalui penyusunan kompetensi dasar dan silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Prosentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan melalui Perhitungan, Pemetaan, serta penataan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase guru berkualifikasi S1/D4.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah, kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan, terselenggaranya sistem informasi kesehatan

terintegrasi, serta kegiatan penerbitan izin rumah sakit kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten melalui Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan, kegiatan pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten melalui pembinaan dan pengawasan sumberdaya manusia kesehatan dan penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten melalui Perencanaan, distribusi, pemerataan, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui Peningkatan Kompetensi Teknis dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Sumber daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten Kota melalui Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber daya manusia kesehatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase tenaga kesehatan yang berizin.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan untuk kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) melalui pengendalian, pengawasan, penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat

Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRTP sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga melalui Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) melalui Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), dan Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga melalui Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan dan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berizin.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang didukung melalui Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang didukung melalui Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, dan kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota yang didukung melalui Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Program ini dilaksanakan guna mendukung pencapaian indikator Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam Kabupaten Batang. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase luas sawah yang beririgasi dan rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Batang yang dilayani oleh jaringan irigasi.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perdesaan Kabupaten Batang. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak dan Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan pembangunan/ penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) Skala Permukiman. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam wilayah Kabupaten Batang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air dalam kondisi baik.

e. Program Pengembangan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kawasan Strategis Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase infrastruktur lingkungan perumahan yang layak.

f. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kabupaten Batang, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase pemanfaatan gedung yang sesuai dengan peruntukan.

g. Program Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan jalan dilaksanakan melalui : penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan; pengelolaan leger jalan; survei kondisi jalan/ jembatan; pembangunan jalan; pelebaran jalan menuju standar; pelebaran jalan menambah lajur; rekonstruksi jalan; pemeliharaan berkala jalan; pemeliharaan rutin jalan; pembangunan jembatan; penggantian jembatan; pelebaran jembatan; rehabilitasi jembatan; pemeliharaan rutin jembatan; dan pemeliharaan berkala jembatan. Program penyelenggaraan jalan dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam).

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Program ini dilakukan untuk rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten, koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah beserta dengan pemanfaatan tata ruang. Program ini dilakukan guna mencapai indikator Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan

Program pengembangan perumahan ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase RLH bagi korban bencana/ terdampak program pemerintah.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada : kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha melalui koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh; dan kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini dilaksanakan melalui penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk menunjang fungsi hunian serta koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan. Program ini dilakukan untuk memenuhi indikator persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan penanganan gangguan Trantibum Linmas; Penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota; Pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota; Pengembangan kinerja dan kapasitas Satlinmas Kabupaten/Kota. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; Penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran; Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase waktu tanggap "*response time*".

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada pengembangan potensi kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran tindak kekerasan dengan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. pelaksanaan program ini guna mencapai

indikator persentase Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang berhasil dipulangkan.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar melalui penyediaan permakanan, Sandang, Alat Bantu, Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak, Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Layanan Data dan Pengaduan dan Pemberian Layanan Rujukan melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pengelolaan anak terlantar dan data miskin kabupaten melalui penjangkauan anak-anak terlantar dan data fakir miskin serta fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan memenuhi kebutuhan dasar bencana alam dan sosial dengan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang didukung dengan Penyediaan Makanan, Penyediaan Sandang, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial dan dengan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan memelihara Taman Makam Pahlawan dengan kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang didukung dengan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana, pemeliharaan, serta pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro melalui kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase Kegiatan yang mengacu RTK

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta melalui kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta serta pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu rasio penduduk yang bekerja

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja sehingga tenaga kerja dapat

memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, serta pemberi Kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya melalui kegiatan pelayanan antar kerja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase pencari pekerja yang mendapat pekerjaan.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan dan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan. Selain itu, melalui kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan, program hubungan industrial diarahkan untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu penurunan jumlah perselisihan HI.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG; Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG; Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan melalui sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi; Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi. Penguatan dan pengembangan

lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan melalui advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase ARG pada belanja langsung APBD.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan; Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan. penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi melalui penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan; Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan; Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak melalui pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam

mewujudkan KG dan hak anak melalui advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak; Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga; Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak melalui pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator partisipasi angkatan kerja perempuan

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data melalui penyediaan data gender dan anak serta penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator cakupan data pilah gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelebagaan pha pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha; Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak; Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator cakupan kecamatan layak anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak; Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi melalui penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus; Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan; Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan; Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Indikator yang hendak dicapai dengan adanya program ini adalah cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu.

3. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan, termasuk penyediaan infrastruktur lumbung pangan, penyediaan infrastruktur rantai jemur, serta penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya. program ini memiliki indikator yang akan

dicapai yaitu persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah melalui penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan, penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal, pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan, pemantauan stok, pasokan dan harga pangan, dan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia. Selain itu, program ini diarahkan pada pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten. Adapun indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah Skor Pola Pangan Harapan.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan serta penanganan kerawanan pangan. melalui penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan; koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten; pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah. Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam, penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat serta keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok. Adapun indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah rasio desa mandiri pangan.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program pengawasan keamanan pangan diarahkan untuk menjaga persentase pengawasan keamanan pangan yang merupakan indikator yang ingin dicapai dari adanya program ini

melalui kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase fasilitasi hak atas tanah program daerah dan penyelesaian permasalahan pertanahan.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) melalui penyusunan dan penetapan RPPLH serta pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten Batang. Selain itu, program ini juga diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) melalui pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang serta pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator tingkat ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator indeks kualitas air dan indeks kualitas udara.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini dilaksanakan melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati. Program ini dilakukan untuk memenuhi indikator persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam kondisi baik.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Selain itu, program ini juga diarahkan pada kegiatan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH serta pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Program ini dilakukan untuk memenuhi indikator persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat

Program ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup bagi lembaga kemasyarakatan dengan pelaksanaan sosialisasi terhadap komunitas peduli LH. Program ini dilaksanakan untuk

memenuhi indikator persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup.

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penilaian sekolah peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten.

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyusunan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah melalui penyusunan masterplan persampahan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui kegiatan pasukan got, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase penanganan sampah di Kabupaten Batang.

6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk serta pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen, atas pelaporan peristiwa kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pencatatan sipil serta pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen, atas pelaporan peristiwa penting. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan data kependudukan serta pemanfaatan dan penyajian database kependudukan. Program ini dilakukan dengan cara pengolahan dan penyajian data kependudukan untuk mencapai indikator persentase penyajian data kependudukan yang valid.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan penataan desa yang didukung fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase budaya desa yang dilestarikan.

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang didukung dengan adanya fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemdes, fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta penyelenggaraan kepala desa. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase desa yang tertib administrasi sesuai peraturan yang berlaku.

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Desa melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten yang didukung dengan fasilitasi kelembagaan desa, penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan desa, fasilitasi tim penggerak PKK, serta fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam peningkatan PAD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk melalui penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK); Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK); Penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal; Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal; Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur nonformal dan informal; Implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan nonformal;

Pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga; Pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk melalui perumusan parameter kependudukan; Penyediaan dan pengolahan data kependudukan; penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; Membentuk rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain; Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga; Pemanfaatan data hasil pemutakhiran data keluarga; Penyediaan data dan informasi keluarga; Pencatatan dan pengumpulan data keluarga; Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB; Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal; Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah; dan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator peningkatan cakupan kesertaan Ber-KB

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota

dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator Cakupan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL).

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten, pengelolaan terminal penumpang tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten, pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten, peningkatan kapasitas penilai Andalalin, koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin, pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin, serta audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui pengelolaan media komunikasi publik; Layanan hubungan media; Pelayanan informasi publik; Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; Monitoring opini dan aspirasi publik; Manajemen komunikasi krisis; dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik. Program

ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten melalui penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah dan terselenggaranya pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah Kabupaten melalui Pengelolaan pusat data pemerintah daerah; Pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota cerdas dan kota cerdas; dan Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase jumlah layanan yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi.

11. Koperasi dan UKM

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penilaian dan Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam satu daerah Kabupaten. Melalui pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dan penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi, program ini diarahkan untuk mencapai indikator persentase koperasi aktif.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator persentase peserta pelatihan dengan predikat baik.

c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada monitoring, evaluasi dan pendampingan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten serta pembinaan dan pengawasan koperasi. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase peserta diklat dengan predikat baik.

d. Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah UMKM

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase pertambahan wirausaha baru.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil melalui fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi; promosi produk Usaha Kecil dan Menengah; dan monitoring, evaluasi dan pelaporan UMKM. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase produk UMKM yang terstandarisasi.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan melalui penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal serta pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota melalui penyusunan rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota; penyediaan peta potensi dan peluang usaha

kabupaten/kota. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA).

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota melalui penyusunan strategi promosi penanaman modal dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Batang.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program pelayanan penanaman modal diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota melalui Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan; serta Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah jumlah izin usaha yang diterbitkan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal diarahkan pada pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda melalui koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor; koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula; koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota; pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan; pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD tingkat Kabupaten/Kota; perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan Kabupaten/Kota; pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi;

peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda; dan penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera. Selain itu, program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan juga diarahkan pada pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha serta peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase organisasi kepemudaan yang dibina.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota; penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota; pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi; pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga; serta pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah capaian medali kejuaraan.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik; peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah; pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah; penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah Kabupaten/Kota; penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah; penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah; perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah; serta

partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah penghargaan yang diterima.

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan statistik adalah program penyelenggaraan statistik sektoral. Program ini diarahkan pada koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral, membangun metadata statistik sektoral, pengembangan infrastruktur melalui pemeliharaan dan pengembangan sistem statistik sektoral, serta peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase ketersediaan data statistik sektoral.

15. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan persandian adalah program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Program ini diarahkan pada pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten berbasis elektronik dan non elektronik. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan dan kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator peningkatan jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional serta peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional.

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan cagar budaya. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase benda cagar budaya yang dilestarikan.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembinaan perpustakaan. Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota serta pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah, pengelolaan arsip statis daerah, serta pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala

kabupaten/kota, penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan, kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota, dan kegiatan pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota; pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota; pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI); serta penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah prosentase capaian produksi perikanan tangkap.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada pemberdayaan pembudidaya ikan kecil melalui pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil dan pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha serta pengelolaan pembudidayaan ikan melalui penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota dan

pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase capaian produksi perikanan budidaya.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan pada pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air melalui pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah capaian bina kelompok masyarakat pengawas.

d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil melalui penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam satu daerah Kabupaten/Kota serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah Kabupaten/ Kota melalui peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 satu daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase capaian tingkat konsumsi makan ikan.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata diarahkan pada pengelolaan daya tarik wisata; pengelolaan kawasan strategis pariwisata;; pengelolaan destinasi pariwisata; dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah tingkat Kabupaten/Kota. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program pemasaran pariwisata diarahkan pada pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota melalui penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota; penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota, baik dalam dan luar negeri; peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri; monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan wisatawan.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah melalui pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pengembangan riset; pengembangan pendidikan; fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; penyediaan infrastruktur; pengembangan sistem pemasaran; pemberian insentif; fasilitasi kekayaan intelektual; perlindungan hasil kreativitas; penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif; dan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata; pelatihan dasar

sdm kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa); sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata; fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif; fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif, dan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif; dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia Usaha; Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat.

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengawasan penggunaan sarana pertanian melalui pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi; pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian, dan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota melalui peningkatan kualitas SDG hewan / tanaman. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ditujukan untuk mencapai target indikator produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun.

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengembangan prasarana pertanian melalui koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya dan pembangunan prasarana pertanian melalui pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani; pembangunan, rehabilitasi dan

pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya; dan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator capaian jumlah hewan yang terobati.

d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian melalui pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian ditujukan untuk mencapai target indikator persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator jumlah asuransi usaha ternak sapi/kerbau dan calon/penerima (orang/perusahaan) pendampingan perizinan usaha peternakan

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada pelaksanaan penyuluhan pertanian melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa; pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa; dan pembentukan badan usaha milik petani. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian, Persentase validitas data Pertanian, dan Persentase kenaikan pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan.

4. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan; penerbitan tanda daftar gudang; penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; dan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/ Kota. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator jumlah verifikasi teknis.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan melalui penyediaan sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya melalui pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/ Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat; Koordinasi dan sinkronisasi

peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat; Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat. Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota melalui pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota; Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan; dan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan; Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi; dan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten/Kota; Pameran dagang nasional; Pameran dagang lokal; Misi dagang bagi produk ekspor unggulan; Peningkatan citra produk ekspor; dan pembinaan pelaku usaha ekspor. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator nilai ekspor perdagangan.

e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang; Pengawasan/penyuluhan metrologi legal. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator Persentase pelaksanaan pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang.

5. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota melalui penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat; evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan jumlah pelaku IKM.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota melalui fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam

lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/ Kota. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan jumlah perizinan berusaha sektor industri.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota melalui fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri Kabupaten/Kota melalui SIINas; dan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase jumlah industri dalam SIINas.

6. Transmigrasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan transmigrasi. Program ini diarahkan pada kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota melalui pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase transmigran yang berhasil ditempatkan.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan melalui penataan administrasi pemerintahan,

pengelolaan administrasi kewilayahan serta fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah, kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat melalui fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dan masyarakat, kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum melalui fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum, serta kegiatan fasilitasi kerjasama daerah melalui fasilitasi kerja sama dalam negeri. Program ini dilaksanakan guna mendukung pencapaian indikator Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu, Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi, Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi, dan Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi

b. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian yang didukung pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil, dan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD; kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang didukung melalui Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, dan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan; kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang didukung melalui Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; serta kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang didukung Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Energi dan Air. Program ini dilaksanakan guna pencapaian indikator Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal), Persentase kebijakan

perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti, Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target, dan Persentase lelang melalui e-procurement.

c. Program Administrasi Umum

Beberapa kegiatan dalam Urusan Sekretariat Daerah ada yang masuk ke dalam program penunjang. Kegiatan ini diarahkan dalam Penataan Organisasi, Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Program ini dilaksanakan guna pencapaian indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Tingkat Kematangan OPD, Persentase Kegiatan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Kepala Daerah, Persentase layanan kebutuhan kantor yang terpenuhi, Persentase layanan kepegawaian yang terpenuhi, Persentase kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD yang diarahkan pada pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, melalui penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah, pembahasan rancangan Perda, penyelenggaraan kajian perundang-undangan, dan fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik. Kemudian, program juga diarahkan pada Pembahasan Kebijakan Anggaran, melalui pembahasan KUA dan PPAS. pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, pembahasan APBD, pembahasan APBD Perubahan, pembahasan Laporan Semester, dan pembahasan Pertanggungjawaban APBD. kemudian juga diarahkan pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, melalui pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur,

pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat, pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian, pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan, pengawasan penggunaan anggaran, dan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Setelah itu program juga diarahkan pada peningkatan kapasitas dprd melalui pendalaman tugas DPRD, publikasi dan dokumentasi dewan, penyediaan tenaga ahli fraksi, penyelenggaraan hubungan masyarakat, dan penyusunan program kerja DPRD. Arah lain dari program ini adalah pada penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, melalui kunjungan kerja dalam daerah, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, dan pelaksanaan reses. Arah lain yaitu pada pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD, melalui pengawasan kode etik DPRD. yang terakhir program ini diarahkan pada fasilitasi tugas DPRD melalui koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah, dan fasilitasi tugas pimpinan DPRD. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peraturan daerah non APBD yang ditetapkan, persentase perda APBD yang ditetapkan, serta persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, melalui Analisis Kondisi Daerah, permasalahan, dan isu strategis Pembangunan Daerah, Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Pelaksanaan Konsultasi Publik, Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD, Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, Penyiapan

Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun.

Kemudian program ini juga diarahkan pada kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui: Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penyusunan Profil pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target Jumlah data dan informasi yang tersedia.

Selain itu, program ini juga diarahkan pada Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui Monitoring, evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah. kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah Perangkat Daerah yang sudah melaporkan evaluasi tepat waktu

Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu, persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah, serta Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia, melalui: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Kegiatan ini untuk memenuhi Jumlah laporan hasil perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

kemudian terdapat kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), melalui: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, serta Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Selain itu, terdapat kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, melalui: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Koordinasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target Jumlah laporan hasil perencanaan bidang IPW.

Program ini dilakukan untuk mencapai target persentase indikator program prioritas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target, persentase indikator program pembangunan bidang PSDA yang mencapai target, dan persentase indikator program pembangunan bidang IPW yang mencapai target.

2. Keuangan

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, serta koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Program ini memiliki indikator yang harus dipenuhi yaitu penyampaian Raperda APBD tepat waktu.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini dilaksanakan melalui penyusunan standar harga penatausahaan barang milik daerah; pengamanan barang milik daerah; optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator tersusunnya data aset Pemerintah Daerah menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemanfaatan, dan kondisinya.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui perencanaan pengelolaan pajak daerah penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah; pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah; pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah; penetapan wajib pajak daerah; pelayanan dan konsultasi pajak daerah; penagihan pajak daerah; serta pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah. Program ini memiliki indikator yang harus dicapai yaitu persentase peningkatan penerimaan PAD, penyampaian raperda pertanggungjawaban tepat waktu, dan persentase realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program kepegawaian daerah. Program ini diarahkan pada kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, kegiatan mutasi dan promosi ASN, kegiatan pengembangan kompetensi ASN, dan kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengembangan sumber daya manusia. Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan kompetensi teknis serta kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Program ini diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, melalui Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, dan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan. kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi target Jumlah hasil kajian bidang pemerintahan yang mendukung perencanaan pembangunan.

Kemudian Program ini juga diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, melalui Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial dan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah rekomendasi kajian bidang sosial dan kependudukan yang mendukung perencanaan pembangunan.

Selain itu, program ini juga diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan, melalui Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan dan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah rekomendasi kegiatan kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang mendukung perencanaan pembangunan.

Serta program ini juga diarahkan pada kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, melalui Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif, Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan, dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.

Program ini ini dilakukan untuk memenuhi target Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti.

F. Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Pengawasan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal melalui penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu melalui penyediaan bahan logistik kantor. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase jumlah pemeriksaan yang dilakukan.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada pendampingan dan asistensi melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; Pengawasan kinerja pemerintah daerah; Reviu laporan kinerja; Reviu laporan keuangan; Pengawasan desa; Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; Kerjasama pengawasan internal; Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah; Pengawasan dengan tujuan tertentu; Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah; Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi; Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan; dan Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi

pengawasan. program ini ditujukan untuk mencapai indikator Level SPIP.

G. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan Batang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan

kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

2. Kecamatan Wonotunggal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai

indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

3. Kecamatan Bandar

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

4. Kecamatan Blado

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan

instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

5. Kecamatan Bawang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan

administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

6. Kecamatan Kandeman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas

forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

7. Kecamatan Tulis

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai

indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

8. Kecamatan Subah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

9. Kecamatan Pecalungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan

instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

10. Kecamatan Tersono

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan

administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

11. Kecamatan Limpung

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas

forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

12. Kecamatan Banyuputih

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai

indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

13. Kecamatan Gringsing

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

14. Kecamatan Warungasem

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan

guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

15. Kecamatan Reban

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan

administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target persentase masyarakat yang mengikuti Wasbang.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik, melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase parpol dan lembaga pendidikan yang berperan aktif mendukung pemerintah.

c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan melalui Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan.

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase masyarakat yang paham ketahanan Ekososbud.

e. Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan

Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase penurunan konflik sosial.

4.4. PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Komposisi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3

Plafon Perubahan Aggaran Sementara untuk Belanja Kabupaten Batang
Tahun Anggaran 2025

KODE AKUN	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH
5	BELANJA DAERAH	2.038.458.065.209,00	2.074.652.775.737,73	36.194.710.528,73
5.1	BELANJA OPERASI	1.472.243.382.498,00	1.517.933.048.313,73	45.689.665.815,73
5.1.01	Belanja Pegawai	903.088.413.817,00	967.291.530.156,00	64.203.116.339,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.104.743.128,00	471.541.834.631,73	(15.562.908.496,27)
5.1.05	Belanja Hibah	70.171.437.553,00	70.369.108.693,00	197.671.140,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.878.788.000,00	8.730.574.833,00	(3.148.213.167,00)
5.2	BELANJA MODAL	190.500.869.231,00	163.133.693.345,00	(27.367.175.886,00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.195.403.724,00	30.329.798.856,00	(4.865.604.868,00)

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.476.297.924,00	47.489.400.783,00	(23.986.897.141,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.048.827.222,00	72.098.453.345,00	49.626.123,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.993.280.361,00	12.187.980.361,00	1.194.700.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	687.060.000,00	928.060.000,00	241.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.150.000.000,00	24.561.101.879,00	12.411.101.879,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.150.000.000,00	24.561.101.879,00	12.411.101.879,00
5.4	BELANJA TRANSFER	363.563.813.480,00	369.024.932.200,00	5.461.118.720,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	19.740.353.280,00	18.638.133.000,00	(1.102.220.280,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	343.823.460.200,00	350.386.799.200,00	6.563.339.000,00

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun 2025 direncanakan dari sebesar Rp 2.038.458.065.209,00 menjadi Rp. 2.074.652.775.737,73 mengalami kenaikan belanja sebesar Rp. 36.194.710.528,73 atau sebesar 1,78%. Perubahan Belanja Daerah ini di pengaruhi oleh perubahan Belanja Operasi dari Rp. 1.472.243.382.498,00 menjadi Rp. 1.517.933.048.313,73, Perubahan Belanja Modal dari Rp. 190.500.869.231,00 menjadi Rp. 163.133.693.345,00, Perubahan Belanja Tak Terduga dari Rp. 12.150.000.000,00 menjadi Rp. 24.561.101.879,00 dan Perubahan Belanja Tranfer dari Rp. 363.563.813.480,00 menjadi Rp. 369.024.932.200,00.

Dengan rincian Perubahan Belanja Daerah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Perubahan Alokasi Belanja Operasi pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.472.243.382.498,00 menjadi Rp. 1.517.933.048.313,73 mengalami kenaikan sebesar Rp. 45.689.665.815,73 atau sebesar 3,10%. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 903.088.413.817,00 menjadi Rp. 967.291.530.156,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 64.203.116.339,00 atau sebesar 7,11%.
- b. Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 487.104.743.128,00 menjadi Rp. 471.541.834.631,73 mengalami penurunan sebesar Rp. 15.562.908.496,27 atau sebesar 3,19%.
- c. Belanja Hibah pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 70.171.437.553,00 menjadi Rp. 70.369.108.693,00 mengalami kenaikan sebesar Rp197.671.140,00 atau sebesar 0,28%.
- d. Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 11.878.788.000,00 menjadi Rp. 8.730.574.833,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.148.213.167,00 atau sebesar 26,05%.

2. Belanja Modal

Perubahan Alokasi Belanja Modal pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 190.500.869.231,00 menjadi Rp. 163.133.693.345,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 27.367.175.886,00 atau sebesar 14,37%. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Tanah pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 menjadi Rp. 100.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari perencanaan.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 35.195.403.724,00 menjadi Rp. 30.329.798.856,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 4.865.604.868,00 atau sebesar 13,82%.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 71.476.297.924,00 menjadi Rp. 47.489.400.783,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 23.986.897.141,00 atau sebesar 33,56%.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 72.048.827.222,00 menjadi

Rp. 72.098.453.345,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 49.626.123,00 atau sebesar 0,07%.

- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 10.993.280.361,00 menjadi Rp. 12.187.980.361,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.194.700.000,00 atau sebesar 10,87%.
- f. Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 687.060.000,00 menjadi Rp. 928.060.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 241.000.000,00 atau sebesar 35,08%.

3. Belanja Tidak Terduga

Alokasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 12.150.000.000,00 menjadi Rp. 24.561.101.879,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.411.101.879,00 atau sebesar 102,15%.

4. Belanja Transfer

Alokasi Belanja Transfer pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 363.563.813.480,00 menjadi Rp. 369.024.932.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.461.118.720,00 atau sebesar 1,5%. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Bagi Hasil pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 19.740.353.280,00 menjadi Rp. 18.638.133.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.102.220.280,00 atau sebesar 5,58%.
- b. Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 343.823.460.200,00 menjadi Rp. 350.386.799.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.563.339.000,00 atau sebesar 1,91%.

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Batang dalam Tahun Anggaran 2025 perlu memahami semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun Rencana perubahan pembiayaan daerah di Kabupaten Batang untuk tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.1

Rincian Plafon Perubahan Anggaran Pembiayaan Kabupaten Batang

Tahun Anggaran 2025

KODE AKUN	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.000.000.000,00	144.858.198.150,73	74.858.198.150,73
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.000.000,00	144.858.198.150,73	74.858.198.150,73
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	70.000.000.000,00	144.858.198.150,73	74.858.198.150,73
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	60.000.000.000,00	139.858.198.150,73	79.858.198.150,73

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang, 2025

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 mulanya diproyeksikan sebesar Rp 70.000.000.000,00 mengalami perubahan menjadi Rp. 144.858.198.150,73 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang awalnya sebesar Rp 70.000.000.000,00 menjadi Rp. 144.858.198.150,73 mengalami kenaikan sebesar Rp. 74.858.198.150,73 atau sebesar 106,94% dari target SiLPA sebelumnya.

Pada kebijakan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 yang seluruhnya di gunakan untuk Penyertaan Modal Daerah. Besaran

Pengeluaran Pembiayaan ini mengalami perubahan dari target sebelum perubahan sebesar Rp 10.000.000.000,00.

Dari perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan didapat Perubahan Pembiayaan Netto dari Rp. 60.000.000.000,00 menjadi Rp. 139.858.198.150,73.

Berdasarkan uraian dari kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan diatas maka ringkasan APBD Kabupaten Batang secara keseluruhan (Pendapatan Belanja dan Pembiayaan) Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.2

Ringkasan APBD Perubahan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025

KODE AKUN	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	411.689.806.831,00	408.008.196.787,00	(3.681.610.044,00)
4.1.01	Pajak Daerah	230.125.000.000,00	217.360.000.000,00	(12.765.000.000,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	157.757.588.738,00	170.109.274.970,00	12.351.686.232,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.774.761.093,00	17.024.865.330,00	(749.895.763,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.032.457.000,00	3.514.056.487,00	(2.518.400.513,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.566.288.258.378,00	1.526.786.380.800,00	(39.501.877.578,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.474.851.006.578,00	1.440.294.530.000,00	(34.556.476.578,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.437.251.800,00	86.491.850.800,00	(4.945.401.000,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	480.000.000,00	-	(480.000.000,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	480.000.000,00	-	(480.000.000,00)
	Jumlah Pendapatan	1.978.458.065.209,00	1.934.794.577.587,00	(43.663.487.622,00)
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.472.243.382.498,00	1.517.933.048.313,73	45.689.665.815,73

5.1.01	Belanja Pegawai	903.088.413.817,00	967.291.530.156,00	64.203.116.339,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.104.743.128,00	471.541.834.631,73	(15.562.908.496,27)
5.1.05	Belanja Hibah	70.171.437.553,00	70.369.108.693,00	197.671.140,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.878.788.000,00	8.730.574.833,00	(3.148.213.167,00)
5.2	BELANJA MODAL	190.500.869.231,00	163.133.693.345,00	(27.367.175.886,00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.195.403.724,00	30.329.798.856,00	(4.865.604.868,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.476.297.924,00	47.489.400.783,00	(23.986.897.141,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan. Jaringan, dan Irigasi	72.048.827.222,00	72.098.453.345,00	49.626.123,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.993.280.361,00	12.187.980.361,00	1.194.700.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	687.060.000,00	928.060.000,00	241.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.150.000.000,00	24.561.101.879,00	12.411.101.879,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.150.000.000,00	24.561.101.879,00	12.411.101.879,00
5.4	BELANJA TRANSFER	363.563.813.480,00	369.024.932.200,00	5.461.118.720,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	19.740.353.280,00	18.638.133.000,00	(1.102.220.280,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	343.823.460.200,00	350.386.799.200,00	6.563.339.000,00
	Jumlah Belanja	2.038.458.065.209,00	2.074.652.775.737,73	36.194.710.528,73
	Total Surplus/(Defisit)	(60.000.000.000,00)	(139.858.198.150,73)	(79.858.198.150,73)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.000.000.000,00	144.858.198.150,73	74.858.198.150,73
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.000.000,00	144.858.198.150,73	74.858.198.150,73
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	70.000.000.000,00	144.858.198.150,73	74.858.198.150,73
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	60.000.000.000,00	139.858.198.150,73	79.858.198.150,73

	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0
--	--	---	---	---

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang, 2025

Sedangkan struktur APBD Perubahan tahun 2025 di proyeksikan tidak ada sisa lebih pembiayaan di tahun anggaran.

Tabel 5.3

Struktur APBD Perubahan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025

KODE AKUN	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.978.458.065.209,00	1.934.794.577.587,00	(43.663.487.622,00)
5	BELANJA DAERAH	2.038.458.065.209,00	2.074.652.775.737,73	36.194.710.528,73
	SURPLUS/(DEFISIT)	(60.000.000.000,00)	(139.858.198.150,73)	(79.858.198.150,73)
6.1	Penerimaan pembiayaan	70.000.000.000,00	144.858.198.150,73	74.858.198.150,73
6.2	Pengeluaran pembiayaan	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	60.000.000.000,00	139.858.198.150,73	79.858.198.150,73
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang, 2025

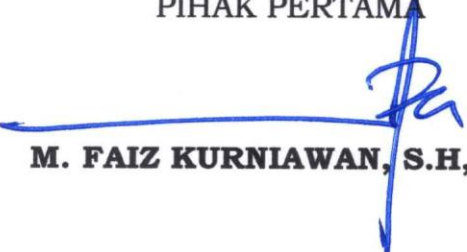
BAB VI
PENUTUP

Demikian dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam menyusun RAPBD Perubahan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025.

Batang, Juni 2025

BUPATI BATANG

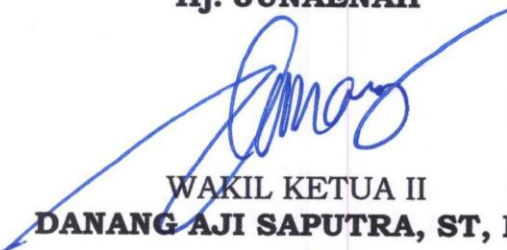
Selaku,
PIHAK PERTAMA


M. FAIZ KURNIAWAN, S.H, M.H

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Selaku,
PIHAK KEDUA


WAKIL KETUA I
Hj. JUNAENAH


WAKIL KETUA II
DANANG AJI SAPUTRA, ST, MH


WAKIL KETUA III
H. BENNY ABIDIN, SH

Matriks Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran berdasarkan Bidang,
Urusan dan Program Kabupaten Batang 2025

BIDANG/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
UNSUR KEWILAYAHAN	52.212.058.594,00	45.687.833.778,00	(6.524.224.816,00)
KECAMATAN	52.212.058.594,00	45.687.833.778,00	(6.524.224.816,00)
KECAMATAN BANDAR	2.747.116.771,00	2.464.237.397,00	(282.879.374,00)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.680.000,00	6.480.000,00	(6.200.000,00)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.678.981.771,00	2.384.677.397,00	(294.304.374,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.455.000,00	25.080.000,00	(5.375.000,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	38.000.000,00	28.000.000,00
KECAMATAN BANYUPUTIH	2.374.752.283,00	2.090.966.875,00	(283.785.408,00)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.503.800,00	4.199.020,00	(4.304.780,00)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.000.000,00	30.000.000,00	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.025.000,00	5.497.500,00	(5.527.500,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.289.093.183,00	2.013.683.735,00	(275.409.448,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.901.500,00	18.510.100,00	(9.391.400,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.228.800,00	19.076.520,00	10.847.720,00
KECAMATAN BATANG	18.544.157.443,00	16.413.619.082,00	(2.130.538.361,00)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.239.000,00	4.270.000,00	(7.969.000,00)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.905.974.350,00	6.876.574.350,00	(29.400.000,00)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.116.000,00	4.537.400,00	(13.578.600,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.577.786.593,00	9.500.285.832,00	(2.077.500.761,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.971.500,00	25.971.500,00	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.070.000,00	1.980.000,00	(2.090.000,00)
KECAMATAN BAWANG	2.181.354.992,00	2.101.639.102,00	(79.715.890,00)

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.490.500,00	9.820.000,00	(11.670.500,00)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.980.100,00	11.746.000,00	(18.234.100,00)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	40.000.000,00	33.480.000,00	(6.520.000,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.040.578.392,00	1.997.403.102,00	(43.175.290,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.985.000,00	29.245.000,00	(7.740.000,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.321.000,00	19.945.000,00	7.624.000,00
KECAMATAN BLADO	2.085.859.420,00	1.749.706.230,00	(336.153.190,00)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.700.000,00	5.050.000,00	(2.650.000,00)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.575.000,00	21.915.000,00	(660.000,00)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.700.000,00	9.550.000,00	(7.150.000,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.024.584.420,00	1.692.791.230,00	(331.793.190,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.600.000,00	2.150.000,00	(4.450.000,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.700.000,00	18.250.000,00	10.550.000,00
KECAMATAN GRINGSING	1.984.811.734,00	1.716.251.291,00	(268.560.443,00)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.244.000,00	5.019.000,00	(5.225.000,00)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.950.000,00	13.320.000,00	(18.630.000,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.891.633.734,00	1.650.687.291,00	(240.946.443,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.684.000,00	23.225.000,00	(14.459.000,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.300.000,00	19.000.000,00	10.700.000,00
KECAMATAN KANDEMAN	1.922.245.025,00	1.734.230.088,00	(188.014.937,00)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.755.000,00	6.505.000,00	(4.250.000,00)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.999.800,00	4.754.900,00	(244.900,00)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.455.000,00	4.855.000,00	(2.600.000,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.871.162.225,00	1.678.492.188,00	(192.670.037,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.618.000,00	19.868.000,00	(750.000,00)

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.255.000,00	19.755.000,00	12.500.000,00
KECAMATAN LIMPUNG	2.262.084.245,00	1.908.321.993,00	(353.762.252,00)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.812.500,00	6.897.400,00	(6.915.100,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.213.869.345,00	1.857.634.693,00	(356.234.652,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan dan Pelayanan Publik	18.177.400,00	18.177.400,00	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.225.000,00	18.112.500,00	11.887.500,00
KECAMATAN PECALUNGAN	2.643.067.355,00	2.324.593.119,00	(318.474.236,00)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	2.200.000,00	(2.800.000,00)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.000.000,00	7.815.500,00	(2.184.500,00)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	7.580.000,00	(2.420.000,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.583.537.355,00	2.266.227.329,00	(317.310.026,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan dan Pelayanan Publik	24.835.000,00	20.682.790,00	(4.152.210,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.695.000,00	20.087.500,00	10.392.500,00
KECAMATAN REBAN	2.734.306.678,00	2.230.969.449,00	(503.337.229,00)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.137.500,00	2.068.800,00	(2.068.700,00)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.750.000,00	6.187.500,00	(6.562.500,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.654.805.816,00	2.164.387.549,00	(490.418.267,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan dan Pelayanan Publik	48.213.362,00	33.573.100,00	(14.640.262,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.400.000,00	19.752.500,00	10.352.500,00
KECAMATAN SUBAH	2.347.707.494,00	2.103.474.074,00	(244.233.420,00)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	2.200.000,00	(2.800.000,00)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	44.000.000,00	39.295.000,00	(4.705.000,00)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.000.000,00	7.615.000,00	(11.385.000,00)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.263.107.494,00	2.032.629.074,00	(230.478.420,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.000.000,00	19.935.000,00	6.935.000,00
KECAMATAN TERSONO	2.511.061.123,00	1.955.799.376,00	(555.261.747,00)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.900.000,00	5.930.000,00	(14.970.000,00)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.300.000,00	39.183.800,00	(6.116.200,00)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	56.410.500,00	30.136.900,00	(26.273.600,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.335.759.623,00	1.848.092.876,00	(487.666.747,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.665.000,00	6.835.800,00	(7.829.200,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.026.000,00	25.620.000,00	(12.406.000,00)
KECAMATAN TULIS	2.058.820.151,00	1.781.831.409,00	(276.988.742,00)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.000.000,00	4.788.000,00	(8.212.000,00)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.000.000,00	35.000.000,00	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.800.000,00	4.734.500,00	(9.065.500,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.949.020.151,00	1.689.188.409,00	(259.831.742,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.000.000,00	28.425.000,00	(6.575.000,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.000.000,00	19.695.500,00	6.695.500,00
KECAMATAN WARUNGASEM	2.355.388.225,00	2.008.970.223,00	(346.418.002,00)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.786.000,00	8.931.000,00	(8.855.000,00)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.005.000,00	5.005.000,00	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.508.000,00	11.078.500,00	(20.429.500,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.234.798.825,00	1.930.493.523,00	(304.305.302,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.333.000,00	29.983.500,00	(11.349.500,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.957.400,00	23.478.700,00	(1.478.700,00)
KECAMATAN WONOTUNGGA	3.459.325.655,00	3.103.224.070,00	(356.101.585,00)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.600.000,00	2.420.000,00	(4.180.000,00)

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.050.000,00	6.425.000,00	(3.625.000,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.385.547.155,00	3.033.790.570,00	(351.756.585,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.078.500,00	31.363.500,00	(4.715.000,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.050.000,00	24.425.000,00	8.375.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.487.483.016,00	6.402.524.631,00	(2.084.958.385,00)
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.487.483.016,00	6.402.524.631,00	(2.084.958.385,00)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.487.483.016,00	6.402.524.631,00	(2.084.958.385,00)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	68.740.000,00	68.740.000,00	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	165.725.000,00	108.075.000,00	(57.650.000,00)
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.949.900.000,00	1.417.550.000,00	(532.350.000,00)
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	866.287.000,00	485.492.000,00	(380.795.000,00)
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.716.759.000,00	1.296.636.000,00	(420.123.000,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.720.072.016,00	3.026.031.631,00	(694.040.385,00)
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	120.073.262.654,00	115.235.242.891,00	(4.838.019.763,00)
SEKRETARIAT DAERAH	61.457.274.659,00	61.313.135.930,00	(144.138.729,00)
SEKRETARIAT DAERAH	61.457.274.659,00	61.313.135.930,00	(144.138.729,00)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	31.242.710.467,00	32.179.127.069,00	936.416.602,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.203.318.232,00	27.671.053.198,00	(532.265.034,00)
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.011.245.960,00	1.462.955.663,00	(548.290.297,00)
SEKRETARIAT DPRD	58.615.987.995,00	53.922.106.961,00	(4.693.881.034,00)
SEKRETARIAT DPRD	58.615.987.995,00	53.922.106.961,00	(4.693.881.034,00)
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20.087.325.000,00	15.400.264.475,00	(4.687.060.525,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.528.662.995,00	38.521.842.486,00	(6.820.509,00)
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	16.841.983.823,00	12.922.188.283,00	(3.919.795.540,00)
INSPEKTORAT DAERAH	16.841.983.823,00	12.922.188.283,00	(3.919.795.540,00)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.800.162.023,00	8.981.299.983,00	(1.818.862.040,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.777.153.500,00	2.848.719.100,00	(1.928.434.400,00)
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.264.668.300,00	1.092.169.200,00	(172.499.100,00)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	438.437.702.770,00	438.157.481.692,00	(280.221.078,00)
KEPEGAWAIAN	7.422.549.202,00	6.425.753.119,00	(996.796.083,00)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.422.549.202,00	6.425.753.119,00	(996.796.083,00)
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.438.093.630,00	1.949.854.719,00	(488.238.911,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.984.455.572,00	4.475.898.400,00	(508.557.172,00)
KEUANGAN	420.145.701.558,00	422.722.603.029,00	2.576.901.471,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	420.145.701.558,00	422.722.603.029,00	2.576.901.471,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.950.862.150,00	1.783.547.025,00	(167.315.125,00)
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	370.846.784.630,00	374.060.106.787,00	3.213.322.157,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.195.025.300,00	3.416.199.800,00	221.174.500,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.153.029.478,00	43.462.749.417,00	(690.280.061,00)
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.756.467.967,00	1.363.956.809,00	(392.511.158,00)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.756.467.967,00	1.363.956.809,00	(392.511.158,00)
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.756.467.967,00	1.363.956.809,00	(392.511.158,00)
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	750.000.000,00	533.197.750,00	(216.802.250,00)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	750.000.000,00	533.197.750,00	(216.802.250,00)
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	750.000.000,00	533.197.750,00	(216.802.250,00)
PERENCANAAN	8.362.984.043,00	7.111.970.985,00	(1.251.013.058,00)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	8.362.984.043,00	7.111.970.985,00	(1.251.013.058,00)
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.910.000.000,00	1.637.370.775,00	(272.629.225,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.163.167.244,00	4.605.103.560,00	(558.063.684,00)
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.289.816.799,00	869.496.650,00	(420.320.149,00)
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	53.821.024.414,00	44.008.273.038,00	(9.812.751.376,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.725.713.575,00	8.351.881.741,00	626.168.166,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.725.713.575,00	8.351.881.741,00	626.168.166,00

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	100.000.000,00	98.645.840,00	(1.354.160,00)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	290.000.000,00	185.919.000,00	(104.081.000,00)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.715.010.000,00	1.771.589.900,00	56.579.900,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	234.000.000,00	174.663.150,00	(59.336.850,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.386.703.575,00	6.121.063.851,00	734.360.276,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	7.054.153.905,00	6.867.296.837,00	(186.857.068,00)
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	7.054.153.905,00	6.867.296.837,00	(186.857.068,00)
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	276.598.105,00	188.611.505,00	(87.986.600,00)
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	191.444.600,00	139.137.550,00	(52.307.050,00)
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	157.000.000,00	142.964.400,00	(14.035.600,00)
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.627.252.000,00	1.783.269.027,00	156.017.027,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.801.859.200,00	4.613.314.355,00	(188.544.845,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.759.251.936,00	3.903.369.696,00	144.117.760,00
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.759.251.936,00	3.903.369.696,00	144.117.760,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	25.505.000,00	12.752.500,00	(12.752.500,00)
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.345.824.809,00	3.704.610.548,00	358.785.739,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	152.572.127,00	66.867.948,00	(85.704.179,00)
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	22.400.000,00	11.200.000,00	(11.200.000,00)
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	107.950.000,00	53.975.000,00	(53.975.000,00)
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	95.000.000,00	48.963.700,00	(46.036.300,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.313.000.000,00	5.142.715.465,00	(170.284.535,00)
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.313.000.000,00	5.142.715.465,00	(170.284.535,00)
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	25.000.000,00	12.940.760,00	(12.059.240,00)
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	25.000.000,00	13.180.000,00	(11.820.000,00)
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.263.000.000,00	5.116.594.705,00	(146.405.295,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	29.860.118.498,00	19.683.760.899,00	(10.176.357.599,00)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-	-
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-	-
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	-
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	-
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	29.860.118.498,00	19.683.760.899,00	(10.176.357.599,00)
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	30.000.000,00	16.349.800,00	(13.650.200,00)
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	797.621.800,00	170.246.300,00	(627.375.500,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.718.807.898,00	15.213.060.602,00	(3.505.747.296,00)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.320.781.800,00	1.814.250.500,00	(5.506.531.300,00)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.246.407.000,00	1.607.583.800,00	(638.823.200,00)
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	719.500.000,00	849.195.897,00	129.695.897,00
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	27.000.000,00	13.074.000,00	(13.926.000,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	108.786.500,00	59.248.400,00	(49.538.100,00)
DINAS KETENAGAKERJAAN	108.786.500,00	59.248.400,00	(49.538.100,00)
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	108.786.500,00	59.248.400,00	(49.538.100,00)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.197.144.267.655,00	1.254.701.528.406,73	57.557.260.751,73
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	351.263.285.283,00	388.344.886.437,73	37.081.601.154,73
DINAS KESEHATAN	351.263.285.283,00	388.344.886.437,73	37.081.601.154,73
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.652.014.000,00	379.711.450,00	(1.272.302.550,00)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	175.936.064.940,00	203.244.571.899,73	27.308.506.959,73
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.551.912.000,00	426.336.650,00	(1.125.575.350,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	171.476.690.343,00	183.869.696.012,00	12.393.005.669,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	646.604.000,00	424.570.426,00	(222.033.574,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17.236.733.776,00	13.970.841.218,00	(3.265.892.558,00)

BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH	6.234.502.216,00	4.162.899.330,00	(2.071.602.886,00)
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	939.138.900,00	861.987.450,00	(77.151.450,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.295.363.316,00	3.300.911.880,00	(1.994.451.436,00)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.002.231.560,00	9.807.941.888,00	(1.194.289.672,00)
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.136.301.800,00	1.100.158.800,00	(36.143.000,00)
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.978.197.300,00	2.004.562.551,00	26.365.251,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.887.732.460,00	6.703.220.537,00	(1.184.511.923,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	112.712.889.450,00	109.903.380.926,00	(2.809.508.524,00)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	112.712.889.450,00	109.903.380.926,00	(2.809.508.524,00)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	11.345.342.000,00	13.956.671.750,00	2.611.329.750,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.575.418.000,00	7.511.464.653,00	1.936.046.653,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.437.055.892,00	6.694.958.228,00	1.257.902.336,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.636.040.000,00	2.370.731.201,00	(7.265.308.799,00)
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	11.692.433.933,00	9.244.928.935,00	(2.447.504.998,00)
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.308.473.775,00	13.892.882.421,00	(3.415.591.354,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	49.937.325.850,00	54.556.968.788,00	4.619.642.938,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.780.800.000,00	1.674.774.950,00	(106.025.050,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	682.894.632.847,00	711.252.717.058,00	28.358.084.211,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	682.894.632.847,00	711.252.717.058,00	28.358.084.211,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.850.000.000,00	1.442.951.200,00	(407.048.800,00)
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	171.021.036.042,00	154.378.780.603,00	(16.642.255.439,00)
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.150.000.000,00	2.052.037.000,00	902.037.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	508.873.596.805,00	553.378.948.255,00	44.505.351.450,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23.130.808.940,00	21.084.261.884,00	(2.046.547.056,00)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23.130.808.940,00	21.084.261.884,00	(2.046.547.056,00)
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	8.734.418.000,00	8.876.714.375,00	142.296.375,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	125.000.000,00	92.374.020,00	(32.625.980,00)
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	9.563.190.900,00	7.953.660.980,00	(1.609.529.920,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.708.200.040,00	4.161.512.509,00	(546.687.531,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	9.905.917.359,00	10.145.440.883,00	239.523.524,00
DINAS SOSIAL	9.905.917.359,00	10.145.440.883,00	239.523.524,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	668.742.750,00	434.022.875,00	(234.719.875,00)
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	625.825.100,00	593.942.570,00	(31.882.530,00)
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	3.500.000,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	121.462.034,00	282.186.767,00	160.724.733,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.552.752.475,00	3.329.742.941,00	(223.009.534,00)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.620.309.000,00	5.268.099.710,00	647.790.710,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	313.326.000,00	235.696.020,00	(77.629.980,00)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	151.440.282.283,00	157.537.703.018,00	6.097.420.735,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.784.665.647,00	7.581.252.357,00	(203.413.290,00)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.784.665.647,00	7.581.252.357,00	(203.413.290,00)
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	485.155.800,00	485.908.600,00	752.800,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	508.554.000,00	446.220.600,00	(62.333.400,00)
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.115.034.320,00	1.234.368.039,00	119.333.719,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.675.921.527,00	5.414.755.118,00	(261.166.409,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	302.497.550,00	198.264.690,00	(104.232.860,00)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	302.497.550,00	198.264.690,00	(104.232.860,00)
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	297.574.150,00	194.517.665,00	(103.056.485,00)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	4.923.400,00	3.747.025,00	(1.176.375,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.699.000.000,00	3.654.012.000,00	(44.988.000,00)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.699.000.000,00	3.654.012.000,00	(44.988.000,00)
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	507.000.000,00	466.500.000,00	(40.500.000,00)
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	800.000.000,00	607.175.000,00	(192.825.000,00)

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.392.000.000,00	2.580.337.000,00	188.337.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	6.122.565.567,00	7.360.637.059,00	1.238.071.492,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	6.122.565.567,00	7.360.637.059,00	1.238.071.492,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	4.311.540.000,00	5.418.632.091,00	1.107.092.091,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.291.000.000,00	1.571.485.625,00	280.485.625,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	200.000.000,00	199.939.900,00	(60.100,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	320.025.567,00	170.579.443,00	(149.446.124,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.906.766.965,00	7.622.241.185,00	(284.525.780,00)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.906.766.965,00	7.622.241.185,00	(284.525.780,00)
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.075.000.000,00	1.144.186.397,00	69.186.397,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.272.044.000,00	1.637.743.400,00	365.699.400,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.559.722.965,00	4.840.311.388,00	(719.411.577,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	9.002.558.530,00	7.920.026.910,00	(1.082.531.620,00)
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	9.002.558.530,00	7.920.026.910,00	(1.082.531.620,00)
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	10.000.000,00	9.589.400,00	(410.600,00)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	29.624.300,00	11.515.000,00	(18.109.300,00)
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	417.840.350,00	-	(417.840.350,00)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	124.805.300,00	-	(124.805.300,00)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	62.402.650,00	224.410.000,00	162.007.350,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	15.000.000,00	7.160.000,00	(7.840.000,00)
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	20.375.700,00	11.037.800,00	(9.337.900,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.322.510.230,00	7.656.314.710,00	(666.195.520,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	17.055.023.456,00	18.304.025.850,00	1.249.002.394,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17.055.023.456,00	18.304.025.850,00	1.249.002.394,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	77.992.400,00	50.454.400,00	(27.538.000,00)
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	393.804.600,00	364.319.570,00	(29.485.030,00)

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.698.160.356,00	4.844.584.306,00	1.146.423.950,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	10.020.000,00	5.010.000,00	(5.010.000,00)
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	227.345.600,00	181.469.320,00	(45.876.280,00)
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	109.359.900,00	78.613.750,00	(30.746.150,00)
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		32.000.000,00	32.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.388.340.600,00	12.487.574.504,00	99.233.904,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000,00	260.000.000,00	110.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.383.940.000,00	1.487.237.100,00	103.297.100,00
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	1.383.940.000,00	1.487.237.100,00	103.297.100,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	212.000.000,00	163.942.500,00	(48.057.500,00)
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	40.000.000,00	28.507.600,00	(11.492.400,00)
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	6.000.000,00	2.400.000,00	(3.600.000,00)
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.125.940.000,00	1.292.387.000,00	166.447.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	26.975.508.405,00	30.714.919.129,00	3.739.410.724,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	26.975.508.405,00	30.714.919.129,00	3.739.410.724,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	20.309.592.800,00	24.723.648.000,00	4.414.055.200,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.346.285.850,00	3.227.221.300,00	(119.064.550,00)
PROGRAM PENATAAN DESA	35.000.000,00	17.348.500,00	(17.651.500,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.284.629.755,00	2.746.701.329,00	(537.928.426,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.924.797.051,00	4.837.241.003,00	(87.556.048,00)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.924.797.051,00	4.837.241.003,00	(87.556.048,00)
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	100.000.000,00	82.258.000,00	(17.742.000,00)
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	115.660.000,00	52.739.000,00	(62.921.000,00)

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	15.080.000,00	8.800.000,00	(6.280.000,00)
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	41.735.000,00	33.775.000,00	(7.960.000,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.621.246.589,00	4.637.209.003,00	15.962.414,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	21.075.462,00	17.900.000,00	(3.175.462,00)
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	10.000.000,00	4.560.000,00	(5.440.000,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.631.603.400,00	4.219.398.311,00	(1.412.205.089,00)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.631.603.400,00	4.219.398.311,00	(1.412.205.089,00)
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	509.033.009,00	358.956.560,00	(150.076.449,00)
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	89.746.400,00	67.019.560,00	(22.726.840,00)
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	150.000.000,00	65.937.370,00	(84.062.630,00)
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	407.747.000,00	156.077.000,00	(251.670.000,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.392.276.991,00	3.498.677.396,00	(893.599.595,00)
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	82.800.000,00	72.730.425,00	(10.069.575,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.608.367.000,00	13.731.627.349,00	2.123.260.349,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.608.367.000,00	13.731.627.349,00	2.123.260.349,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.592.700.000,00	6.457.998.849,00	1.865.298.849,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.555.467.000,00	6.845.228.500,00	289.761.500,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	460.200.000,00	428.400.000,00	(31.800.000,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	35.920.761.959,00	36.477.797.518,00	557.035.559,00
DINAS PERHUBUNGAN	35.920.761.959,00	36.477.797.518,00	557.035.559,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.254.746.341,00	29.373.408.409,00	118.662.068,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.666.015.618,00	7.104.389.109,00	438.373.491,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.276.424.779,00	5.478.021.881,00	201.597.102,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.276.424.779,00	5.478.021.881,00	201.597.102,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	771.849.079,00	1.258.848.940,00	486.999.861,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.504.575.700,00	4.219.172.941,00	(285.402.759,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	100.000.000,00	57.662.750,00	(42.337.250,00)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.000.000,00	57.662.750,00	(42.337.250,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100.000.000,00	57.662.750,00	(42.337.250,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	30.000.000,00	19.013.225,00	(10.986.775,00)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	30.000.000,00	19.013.225,00	(10.986.775,00)
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	30.000.000,00	19.013.225,00	(10.986.775,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	468.137.950,00	270.627.700,00	(197.510.250,00)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	468.137.950,00	270.627.700,00	(197.510.250,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	468.137.950,00	270.627.700,00	(197.510.250,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.247.664.024,00	7.603.697.001,00	356.032.977,00
DINAS KETENAGAKERJAAN	7.247.664.024,00	7.603.697.001,00	356.032.977,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	260.479.665,00	182.181.538,00	(78.298.127,00)
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.214.745.851,00	3.725.694.599,00	2.510.948.748,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	258.404.399,00	292.839.340,00	34.434.941,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.514.034.109,00	3.402.981.524,00	(2.111.052.585,00)
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			-
Grand Total	2.038.458.065.209,00	2.074.652.775.737,73	36.194.710.528,73

Sumber : BPKPAD Kabupaten Batang, 2025